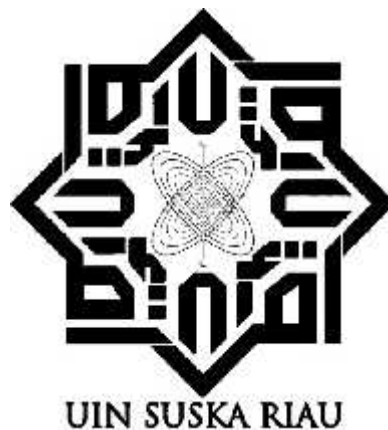


**PERSEPSI MASYARAKAT ETNIS JAWA TERHADAP
TRADISI LARANGAN NIKAH LUSAN BESAN
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura)**

S K R I P S I

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy.)**



ZAINAL ABIDIN

NIM. 10621003683

**PROGRAM STUDI S1
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2013**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur diucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah dan akan senantiasa melimpahkan berkat, rahmat dan hidayah serta petunjuknya-Nya sehingga dapat menyelesaikan dengan baik skripsi ini dengan judul “*Persepsi Masyarakat Etnis Jawa Terhadap Tradisi Larangan Nikah Lusan Besan Menurut Perspektif Hukum Islam*”. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan wajah dan syafaatnya di hari akhir kelak.

Skripsi ini ditulis dan diajukan dengan maksud untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Strata-1 di program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya akan kekurangan-kekurangan dan keterbatasan yang penulis miliki. Namun berkat bantuan, bimbingan, dan petunjuk dari berbagai pihak skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua yaitu ayahanda Jumiran dan ibunda Marpuah tercinta, yang telah banyak memberikan dukungan baik moril maupun materil, jasa ayahanda dan ibunda tidak akan ananda lupakan, karena berkat iringan do'a dan pengorbanan ayahanda dan ibunda yang tulus sehingga ananda bisa menyelesaikan skripsi ini

2. Bapak Prof. Dr. Nazir Karim, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr.H.Akbarizan, M.Ag.M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Drs.Yusran Sabili, MA, selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Srata-1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Zainal Arifin, MA, Selaku seketaris Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Srata-1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Wahidin, MA, selaku pembimbing dan Penasehat Akademis yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu serta memberikan bimbingan, pengarahan dan saran sampai pada tahap skripsi.
7. Bapak dan Ibu dosen selaku staf pengajar yang telah mendidik penulis selama perkuliahan, karyawan serta karyawan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Buat keluarga besar saya, termasuk kakanda Ahmad Tohir, Solehah, Imroatin berserta suami, dan adik-adik yang telah memberikan dorongan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan kuliah ini.
9. Bapak Drs. Rozali, ketua pengurus masjid Nuruzzakirin.
10. Keluarga besar Kang Jarnani sebagai abang yang memberikan motivasi kepada penulis.

11. Buat masyarakat Sabak Auh, terutama tokoh-tokoh pemuka adat yang telah memberikan kontribusi terhadap informasi yang telah diberikan.
12. Untuk sahabat-sahabat, Hakim, Saleh, Hafiz, Ali, Khairiri, terimakasih atas motivasi kita selama ini, bahu-membahu saling membantu, terima kasih atas persahabatan kita.
13. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu selama penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan. Akhirnya di harapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, *Amin*.

Pekanbaru, Januari 2013
Penulis,

Zainal Abidin
NIM.10621003683

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: Persepsi Masyarakat Etnis Jawa Terhadap Tradisi Larangan Nikah Lusan Besan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat etnis jawa tentang tradisi larangan nikah lusan besan di Kecamatan Sabak Auh, dan faktor yang menyebabkan adanya larangan nikah karena lusan besan serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan lusan besan pada masyarakat etnis jawa di kecamatan Sabak Auh tersebut. Larangan nikah lusan besan yaitu larangan menikah pada masyarakat etnis jawa, jika orang tua pihak laki-laki telah menikahkan anaknya sebanyak dua kali sementara pihak perempuan baru menikahkan anaknya satu kali.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Pengambilan data dalam penelitian ini adalah menggunakan angket, wawancara, dan observasi. Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat etnis jawa di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura dengan jumlah sampel sebanyak 357 responden yang terbagi ke dalam 8 desa.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat etnis jawa terhadap larangan nikah lusan besan sebagian besar masih tergolong cukup positif yang berarti masyarakat etnis jawa cukup yakin terhadap larangan nikah lusan besan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat tersebut adalah adanya pandangan masyarakat yang menyakini jika melanggar tradisi tersebut akan mendapat petaka dan ketakutan masyarakat akan terputusnya tali silaturahmi serta adanya anggapan beberapa peristiwa yang dianggap telah melanggar tradisi larangan nikah karena lusan besan. Dari segi tinjauan hukum Islam larangan nikah karena lusan besan merupakan larangan yang bertentangan dengan hukum Islam.

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN.....	I
PENGESAHAN.....	II
KATA PENGANTAR.....	III
PERSEMBAHAN.....	VI
ABSTRAK	VIII
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR TABEL	XI
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II. DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Letak Geografis dan Demografis	15
B. Sosial Pendidikan	19
C. Sosial Keagamaan	22
D. Sosial Kemasyarakatan	24
E. Sosial Ekonomi	25
BAB III. KAJIAN PUSTAKA	
A. Tradisi Larangan Nikah Lusan Besan Bagi Masyarakat Suku Jawa	27
B. Pengertian Nikah Menurut Syariat Islam.....	31
C. Dasar dan Hukum Nikah.....	34
D. Rukun dan Syarat Nikah	41
E. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan.....	45
F. Bentuk-bentuk Pernikahan Yang Dilarang	51
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Nikah Lusan Besan pada Masyarakat Etnis Jawa di Kecamatan Sabak Auh	58
B. Faktor yang Menyebabkan Adanya Tradisi Larangan Nikah Lusan Besan pada Masyarakat Etnis Jawa di Kecamatan Sabak Auh	71

C.	Tinjuan hukum Islam Tentang Tradisi Larangan Nikah Lusan Besan pada Mayarakat Etnis Jawa di Kecamatan Sabak Auh	75
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan	80
B.	Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1.	Jumlah Penduduk Terhitung Bulan Oktober 2012	17
Tabel II. 2.	Jumlah Masyarakat Etnis Jawa di Kecamatan Sabak Auh	17
Tabel II. 3.	Jumlah Penduduk Yangwajib KTP dan yang Memiliki KTP Terhitung Bulan Oktober 2012.....	18
Tabel II. 4.	Data Penduduk Kecamatan Sabak Auh Terhitung Bulan Oktober 2012	19
Tabel II. 5.	Rekapitulasi Administrasi Wilayah Kecamatan Sabak Auh Terhitung Bulan Oktober 2012.....	19
Tabel II. 6.	Sarana Pendidikan Kecamatan Sabak Auh Tahun 2011	20
Tabel II. 7.	Tingkat Pendidikan Kecamatan Sabak Auh Tahun 2012.....	21
Tabel II. 8.	Jumlah Penduduk Kecamatan Sabak Auh Menurut Agama Tahun 2011	22
Tabel II. 9.	Sarana Peribadatan di Kecamatan Sabak Auh Tahun 2012	23
Tabel II. 10.	Jumlah Penduduk Kecamatan Sabak Auh Berdasarkan Mata Pencarian Tahun 2011	25
Tabel IV. 1.	Jawaban Respoden Tentang Pendapat Adanya Tradisi Larangan Nikah Lusan Besan di Kecamatan Sabak Auh.....	59
Tabel IV. 2.	Jawaban Respoden Tentang Pendapat Dilaksanakan Pernikahan pada Orang Lain	60
Tabel IV. 3.	Jawaban Respoden Tentang Pendapat Keyakinan Terhadap Tradisi Larangan Nikah Lusan Besan	61
Tabel IV. 4.	Jawaban Respoden Tentang Pendapat Kelayakan Tradisi Lusan Besan Untuk Dipertahankan	62
Tabel IV. 5.	Jawaban Respoden Tentang Pendapat Kesesuaian Tradisi Pada saat ini	62
Tabel IV. 6.	Jawaban Respoden Tentang Pendapat Larangan Nikah Lusan Besan di Dalam Keluarga.....	63
Tabel IV. 7.	Jawaban Respoden Tentang Pendapat Peristiwa Pelanggaran Tradisi Lusan Besan	64

Tabel IV. 8. Jawaban Respoden Tentang Pendapat Diberlakukannya Tradisi Lusan Besan Pada Etnis Jawa	65
Tabel IV. 9. Jawaban Respoden Tentang Pendapat Pelaksanaan Pernikahan Pada Diri Sendiri	66
Tabel IV. 10. Jawaban Respoden Tentang Pendapat Kesesuaian Larangan Menikah Lusan Besan Dengan Hukum Islam	67
Tabel IV. 11. Rekapitulasi Data Tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Nikah Lusan Besan Dalam Perspektif Islam	68
Tabel IV. 12. Nilai Kumulatif Perhitungan Angket Untuk Pertanyaan Positif.....	68
Tabel IV. 13. Nilai Kumulatif Perhitungan Angket Untuk Pertanyaan Negatif	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecamatan Sabak Auh merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Siak Sri Indrapura, Kecamatan yang berbentuk geografisnya beragam, dimana terdapat daerah yang datar yaitu di Pingiran Sungai Siak dan juga terdapat daerah yang rawa-rawa dan lembah. Daerah ini hidup masyarakat dari berbagai etnis dan suku diantaranya: Suku Jawa, Suku Melayu, Suku Cina dan Suku Batak. Dari berbagai suku ini mayoritasnya adalah suku Jawa, dan beragama Islam. Masyarakat Jawa yang ada di Kecamatan Sabak Auh umumnya hidup sebagai petani kelapa sawit, dan padi. Perlu juga penulis jelaskan bahwa masyarakat Jawa di daerah ini termasuk masyarakat pertama mengelola pertanian di Kecamatan Sabak Auh, yang waktu itu berprofesi sebagai petani padi.

Ciri khusus dari masyarakat Jawa adalah masyarakat yang dimanapun berada senantiasa berpegang pada kebudayaan dan tradisi nenek moyang mereka, karenanya masyarakat Jawa yang ada di Kecamatan Sabak Auh meskipun telah lama meninggalkan kampung halamannya, namun ada beberapa hal masih tetap memegang teguh tradisi yang diwariskan nenek moyang mereka.

Adapun yang dimaksud dengan tradisi adalah, adat kebiasaan, ajaran turun temurun dari nenek moyang¹. Selanjutnya yang dimaksud dengan kebiasaan adalah suatu kaedah yang tidak hanya dikenal, diakui dan dihargai tetapi juga dita'ati, Adat kebiasaan atau dikenal juga dengan adat istiadat yang mempunyai ikatan dan pengaruh dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut, terutama bertitik tolak pada perasaan keadilan.²

Diantara sekian banyak tradisi yang ada dalam masyarakat Jawa umumnya dan masyarakat Jawa di Kecamatan Sabak Auh khususnya, ada larangan adat yang harus dipatuhi dan dijauhi dalam menerima menantu dalam melangsungkan pernikahan. Seperti halnya larangan melaksanakan nikah, apabila dikarenakan "*Lusan Besan*" tersebut merupakan larangan adat. Dan apabila dilaksanakan maka akan memberi dampak yang negatif, karena melanggar hukum adat.

Pelaksanaan dari tradisi masyarakat Jawa di atas, masih dipegang teguh oleh masyarakat Jawa yang ada di Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak. Nikah lusan besan ialah orang tua pihak laki-laki yang sudah menikahkan anak kandungnya sebanyak dua kali, sedangkan orang tua pihak perempuan baru satu kali. Dari situlah istilah tradisi lusan besan itu ada. Jika ada dua orang dikarenakan lusan besan melakukan pernikahan maka pernikahan tersebut

¹Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Bintang Pelajar, 1994),Cet. ke-1 h. 3.

²Abdul Rahman, *Hukum Adat Menurut Undang-Undang Republik Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 1984), Cet. ke-2, h. 15.

dilarang dan tidak boleh dilakukan di tempat tinggalnya, pernikahan tersebut harus dilakukan di luar daerah tempat tinggalnya, dan wali dari pihak perempuan tidak menjadi wali nikah.³

Menurut Damiran (masyarakat kecamatan Sabak Auh Desa Belading), bahwa pernikahan tersebut pernah terjadi, sehingga pernikahan tersebut memberi dampak buruk bagi salah satu keluarga yang melangsungkan pernikahan tersebut. Artinya salah satu dari pihak perempuan atau laki-laki akan bernasib tidak baik. Adapun yang melakukan pernikahan seperti ini adalah Yaimun (alm) (masyarakat Desa Belading), pada tanggal 6 September tahun 2009, Sringatun (anak) dan Safrizal (menantu), mereka melangsungkan pernikahan yang ada hubungan lusan besan. Pernikahan ini memberi dampak buruk, setelah beberapa bulan orang tua Sringatun meninggal dunia yang kurang wajar.⁴

Tumiran (masyarakat), pada tanggal 21 Februari 2010 merencanakan perkawinan Sudarman dengan Rini, tapi pihak keluarga Sudarman tidak menerima Rini menjadi istri Sudarman (sebagai anak menantu). karena orang tua dari Rini baru 1 (satu) kali menerima menantu sedangkan pihak Sudarman sudah 2 (dua) kali. Dan akhirnya Sudarman dan Rini memaksakan diri untuk melangsungkan pernikahan tanpa sepengetahuan orang tua Rini di Malaysia, kalau tidak demikian maka pernikahannya tidak boleh berlangsung.⁵

³Semo, Tokoh Adat, *wawancara*, desa Belading, 8 Agustus 2011

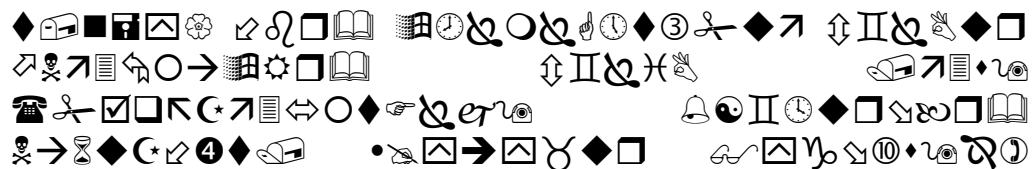
⁴Damiran, Masyarakat, *wawancara*, desa Belading, 9 Agustus 2011

⁵Tumiran, Masyarakat, *wawancara*, desa Laksamana, 20 Agustus 2011

Muslim (masyarakat), pada tanggal 3 Maret 2011 ingin melangsungkan pernikahan anaknya dan ternyata calon anaknya tersebut lusan besan. Dan akhirnya Muslim membatalkan pernikahan anaknya, karena tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari dikarenakan melanggar adat tersebut.⁶

Sebagaimana diketahui bahwa adat adalah hukum atau tradisi yang dibuat oleh nenek moyang masyarakat kita dahulu, hukum atau tradisi tersebut sifatnya tidak mengikat yang seperti halnya hukum pidana pada umumnya. Pelanggar terhadap hukum adat akan tidak diikut sertakan dalam urusan adat, bahkan akan dikucilkan oleh masyarakat yang taat dengan adat tersebut. Karena orang yang melanggar hukum adat tersebut tidak mau mengikuti hukum atau aturan yang sudah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat suku Jawa umumnya dan di Kecamatan Sabak Auh khususnya.

Pernikahan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁷ Ketentuan masalah perkawinan ini dijelaskan dalam al-Qur'an dalam surah al-Rum (30: 21) yang berbunyi :



⁶Muslim, Masyarakat, Wawancara, desa Laksamana, 20 Agustus 2011

⁷Undang-undang Perkawinan, No. 1 1974 dengan Penjelasan PP. No 9 tahun 1975, (Semarang: Aneka Ilmu, 1990), Cet. ke-1, h. 1.



Artinya :”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁸

Untuk melangsungkan suatu pernikahan Islam hanya menetapkan orang-orang tertentu yang dilarang untuk dinikahi, yaitu :

1. Karena senasab, yaitu: Ibu, anak, perempuan saudara perempuan, saudara perempuan ayah, saudara perempuan ibu, anak perempuan saudara perempuan, dan anak perempuan saudara laki-laki.
2. Karna perkawinan, yaitu: bekas istri Ayah, bekas istri anak, Ibu istri, dan anak perempuan istri.
3. Karena sesusuan.
4. Karena lain agama
5. Karna masih dalam iddah
6. Karena masih istri orang lain⁹

Menurut Imam Syafi’i, pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali bila dinikahkan oleh wali aqrab (dekat), kalau tidak ada wali yang dekat, maka dinikahkan oleh wali ab’ad (jauh), dan kalau tidak ada, maka dapat dinikahkan oleh penguasa wali hakim. Urutan tingkat wali tersebut adalah ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara

⁸Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989)

⁹H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, th), Cet. ke-1, h. 31

laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah.¹⁰

Sedangkan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akad nikah dilakukan oleh wali sendiri atau diwakilkan kepada pegawai pembantu pencatat nikah atau P3N atau menurut orang lain yang menurut P3N di anggap memenuhi syarat, akad nikah dilangsungkan dihadapan P3N, yang mewilayahi tempat tinggal calon istri, dan dihadiri oleh dua orang saksi. Apabila akad nikah di laksanakan diluar ketentuan tersebut, maka kedua calon pengantin atau walinya harus memberitahukan kepada P3N yang mewilayahi tempat tinggal calon Istri. Sebagaimana yang terdapat dalam buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pada pasal 5 disebutkan bahwa

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada pasal satu (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 Undang-Undang No.32 1974.

Lebih lanjut Juga terdapat pada pasal 6 :

1. Untuk memenuhi ke pengawasan ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.

¹⁰H. S. A al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam, Alih Bahasa Agus Salim*, (Jakarta: Pustaka Amami, 1989), Cet. ke-2, h. 102

2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum.¹¹

Berangkat dari kenyataan pada masyarakat suku Jawa di kecamatan Sabak Auh, dan hubungan dengan ketentuan perkawinaan dalam Islam. Hal ini yang melatar belakangi penulis untuk membuat suatu penelitian yang diberi judul: **PERSEPSI MASYARAKAT ETNIS JAWA TERHADAP TRADISI LARANGAN NIKAH LUSAN BESAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura).**

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan, penulis membatasi pembahasan supaya terfokus pada pokok masalah yang ada. Adapun batasan tersebut adalah: Larangan nikah lusan besan menurut perspektif hukum Islam ditinjau dari persepsi masyarakat etnis Jawa di Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak Sri Indrapura.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah persepsi masyarakat etnis Jawa tentang tradisi larangan nikah lusan besan di kecamatan Sabak Auh?

¹¹Abdul Rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Presindo, 1992), Cet ke-1, h. 114

2. Faktor apa saja yang menyebabkan adanya tradisi larangan nikah lusan besan pada masyarakat etnis Jawa di kecamatan Sabak Auh?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tradisi larangan nikah lusan besan pada masyarakat etnis Jawa di kecamatan Sabak Auh?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat etnis Jawa tentang tradisi larangan nikah lusan besan menurut perspektif hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab adanya larangan nikah karena lusan besan di kecamatan Sabak Auh.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan lusan besan pada masyarakat etnis Jawa di kecamatan Sabak Auh tersebut.

2. Kegunaan penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini dilaksanakan antara lain:

- a. Untuk memperdalam wawasan tentang adat-istiadat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat terutama masalah larangan pernikahan.
- b. Sebagai bahan sumbangan pikiran penulis terhadap ilmu pengetahuan umum dan khususnya dalam bidang hukum Islam.
- c. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi penulis pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah UIN SUSKA RIAU.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yang dilaksanakan di kecamatan Sabak Auh yang masih memegang adat istiadat dalam mengadakan pernikahan.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat etnis Jawa di Kecamatan Sabak Auh.

b. Objek penelitian ini adalah persepsi masyarakat etnis Jawa tentang larangan nikah karena lusan besan di Kecamatan Sabak Auh.

3. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.¹² Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat etnis Jawa di Kecamatan Sabak Auh yang terbagi dalam 8 desa sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil secara *representative* atau mewakili populasi yang bersangkutan atau bagian kecil yang diamati. Untuk pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik *cluster sampling*. Teknik *cluster sampling* (area sampling) adalah teknik yang digunakan untuk menentukan sampel bila objek penelitian membagi populasi kewilayah-wilayah atau klaster tersebut.¹³ Untuk pengambilan sampel dengan menggunakan teknik ini

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet. ke-16, h. 80

¹³*Ibid.*, h. 69

dilakukan dengan dua tahap yaitu pertama menentukan sampel wilayah, dan yang kedua menentukan sampel orang yang mewakili populasi penelitian. Adapun banyak populasi masyarakat etnis Jawa di kecamatan Sabak Auh adalah sebanyak 5743 Jiwa. Untuk ukuran banyaknya sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini, peneliti berpedoman pada tabel *Krejcie-Morgan*. Dari banyaknya populasi masyarakat etnis Jawa sebanyak 5743 orang tersebut diketahui bahwa jumlah sampel yang harus digunakan adalah sebanyak 357 jiwa.

Karena populasi tersebut terbagi kedalam 8 desa maka untuk pengambilan sampel dilanjutkan dengan teknik *stratified random sampling*. Teknik *stratified random sampling* adalah teknik yang digunakan bila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata *secara proporsional*.¹⁴ Dengan demikian sampel untuk setiap desa harus *proporsional* sesuai dengan populasi yang terbagi kedalam delapan desa. Setelah jumlah sampel dari masing-masing strata ditentukan maka untuk mengumpulkan data tentang persepsi masyarakat etnis Jawa tentang larangan nikah lusan besan, peneliti menyebarkan angket kepada responden dengan cara *accidental sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan jalan mengambil individu siapa saja yang dapat dijangkau atau ditemui.

¹⁴Sugiyono, *op.cit.*, h. 82.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diambil langsung dari responden yang terkait langsung dengan tradisi larangan nikah lusan besan.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diambil dari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dengan mengadakan kajian pustaka.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, maka penulis menggunakan metode:

- a. Angket yaitu mendapat data-data dengan menyebarkan sejumlah daftar pertanyaan yang di berikan kepada reponden tentang persepsi masyarakat etinis Jawa tentang tradisi larangan nikah lusan besan menurut perspektif hukum Islam. Jumlah butir instrument yang juga disiapkan sebanyak 10 buah pertanyaan.
- b. Wawancara adalah menanyakan langsung kepada pihak yang terkait untuk memperoleh keterangan yang dapat melengkapi keterangan pada pengumpulan data yang lain untuk memperkuat hasil penelitian ini.
- c. Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan penelitian guna memperjelas fenomena yang terjadi digunakan sebagai data penjelas terhadap hasil angket dan wawancara.

6. Metode Analisa Data

Metode analisa data dalam penelitian ini adalah analisa data deskriptif kuantitatif, yaitu: dengan mengklasifikasikan data ke dalam kategori berdasarkan dari jenis data tersebut, kemudian diuraikan antara data satu dengan data lainnya, kemudian dihubungkan sehingga akhirnya diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

Data yang diperoleh dari angket dianalisis statistik deskriptif dalam bentuk distribusi-frekuensi, yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

F = Frekuensi Jawaban

N = Jumlah yang diteliti

P = Jumlah persentase yang dicari.

Sedangkan untuk mengetahui gambaran yang diharapkan menggunakan persentase sebagai berikut:¹⁵

- a. Jika antara 81- 100% maka dikategorikan sangat positif
- b. Jika antara 61- 80% maka dikategorikan positif
- c. Jika antara 41- 60% maka dikategorikan cukup positif
- d. Jika antara 21- 40% maka dikategorikan tidak positif
- e. Jika antara 0 - 20% maka dikategorikan sangat tidak positif .

¹⁵Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), Cet. ke-2, h. 87.

7. Metode penulisan

- a. Diskriptif yaitu penjelasan apa yang ada dengan memberi gambaran terhadap penelitian.
- b. Deduktif yaitu menguraikan masalah secara umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Induktif yaitu menjelaskan apa yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti secara khusus, kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.

F. Sistematika Penulisan

- Bab Pertama** : Merupakan bab pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, metode penelitian, sistematika penulisan.
- Bab Kedua** : Berisikan tentang tinjauan umum tentang lokasi penelitian, yang terdiri dari geografi dan demografi Kecamatan Sabak Auh, mata pencarian, pendidikan, dan kehidupan beragama masyarakat Sabak Auh.
- Bab Ketiga** : Menguraikan tentang teori-teori yang ada hubungan atau relevansinya dengan masalah yang dibahas yaitu berisi tentang tinjauan umum tentang tradisi larangan nikah lusun besan dan nikah menurut syariat Islam.
- Bab Keempat** : Berisi tentang pembahasan dari hasil penelitian yang terdiri dari: gambaran persepsi masyarakat etnis Jawa

tentang larangan nikah lusan besan, Faktor yang menyebabkan adanya larangan nikah lusan besan, dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan nikah lusan besan.

Bab Kelima : Berisikan tentang kesimpulan dan saran

BAB II

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis dan Demografis

1. Geografis

Kecamatan Sabak Auh merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Siak yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Sungai Apit. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 tahun 2005 tanggal 3 Oktober 2005 tentang pembentukan Kecamatan Mempura dan Kecamatan Sabak Auh, dan diresmikan pada tanggal 13 Desember 2005 yang ditandai dengan pelantikan Camat Sabak Auh pertama oleh Bapak Bupati Siak. Kecamatan Sabak Auh secara Administrasi, saat ini dibagi atas 8 (Delapan) desa/kelurahan, yaitu:

- a. Desa Bandar Sungai (Ibukota Kecamatan)
- b. Desa Sungai Tengah
- c. Desa Belading
- d. Desa Rempak
- e. Desa Laksamana
- f. Desa sabak Permai
- g. Desa Bandar pedada
- h. Desa Selat Guntung.¹⁶

¹⁶ Kepala Bagian Administrasi dan Pemerintahan Kecamatan Sabak Auh

Secara keseluruhan wilayah Kecamatan Sabak Auh memiliki luas $\pm 84,18 \text{ km}^2$. Wilayah Kecamatan Sabak Auh memiliki posisi yang sangat strategis karena merupakan pintu gerbang wilayah Kabupaten Siak dari arah timur yang berbatas langsung dengan Kabupaten Bengkalis. Berada di jalan lintas Propinsi Pekanbaru-Sungai Pakning dan di alur pelayaran sungai Siak. Pada umumnya wilayah Kecamatan Sabak Auh terdiri dari dataran rendah dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Bungaraya.
- c. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.
- d. Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Siak.¹⁷

2. Keadaan Penduduk Kecamatan Sabak Auh

a. Jumlah Penduduk Kecamatan Sabak Auh

Jumlah penduduk Kecamatan Sabak Auh sebanyak 10899 jiwa terhitung sampai bulan Oktober 2012. Penduduk tersebut tersebar di delapan desa. Sebanyak 1728 jiwa di desa Rempak, 1145 jiwa di desa Laksamana, 1110 jiwa di desa Belading, 1096 jiwa di desa Bandar Sungai, 2123 jiwa di desa sungai tengah, 1502 jiwa di desa sabak

¹⁷ Kepala Bagian Administrasi dan Pemerintahan Kecamatan Sabak Auh

permai, 1075 jiwa di desa Bandar Pedada, 1120 jiwa di desa Selat Guntung.

TABEL II.1
JUMLAH PENDUDUK TERHITUNG BULAN OKTOBER 2012

No	Nama Desa	L	P	Jumlah
1	Rempak	841	887	1728
2	Laksamana	605	540	1145
3	Belading	569	541	1110
4	Bandar Sungai	573	523	1096
5	Sungai Tengah	1077	1046	2123
6	Sabak Permai	775	727	1502
7	Bandar Pedada	560	515	1075
8	Selat Guntung	576	544	1120
	Jumlah	5576	5323	10899

Sumber: Kabag. Administrasi dan Pemerintahan Kecamatan Sabak Auh

Dari jumlah penduduk masyarakat di kecamatan Sabak Auh tersebar sebagian besar masyarakatnya adalah masyarakat Jawa. Berdasarkan hasil observasi peneliti dapat dirincikan banyaknya masyarakat etnis Jawa berdasarkan tiap-tiap desa sebagai berikut:

TABEL II.2
JUMLAH MASYARAKAT ETNIS JAWA DI KECAMATAN SABAK AUH

No	Desa	Jumlah	Persentase
1	Rempak	173 Jiwa	3.01%
2	Laksamana	1031 Jiwa	17.96%
3	Belading	944 Jiwa	16.46%
4	Bandar Sungai	658 Jiwa	11.44%
5	Sungai Tengah	1805 Jiwa	31.42%
6	Sabak Permai	751 Jiwa	13.08%
7	Bandar Pedada	269 Jiwa	4.68%
8	Selat Guntung	112 Jiwa	1.95%
	Jumlah	5743 Jiwa	100.00%

Sumber: Data Primer, 2012

b. Jumlah Wajib KTP dan Yang Memiliki KTP Kecamatan Sabak Auh

Dari jumlah penduduk sebanyak 10.899 jiwa sekitar 83.58% telah memiliki KTP dari besarnya wajib KTP. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II.3
JUMLAH PENDUDUK YANG WAJIB KTP DAN YANG
MEMILIKI KTP TERHITUNG BULAN OKTOBER 2012

No	Nama Desa	Wajib KTP			Yang Memiliki KTP			Jumlah
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1	Rempak	747	638	1385	613	622	1235	1728
2	Laksamana	442	411	853	393	357	750	1145
3	Belading	409	367	776	395	374	769	1110
4	Bandar Sungai	434	321	755	334	312	646	1096
5	Sungai Tengah	650	782	1432	595	551	1146	2123
6	Sabak Permai	539	477	1016	319	389	708	1502
7	Bandar Pedada	346	323	669	300	244	544	1075
8	Selat Guntung	363	332	695	289	249	538	1120
	Jumlah	3930	3651	7581	3238	3098	6336	10899

Sumber: Kabag. Administrasi dan Pemerintahan Kecamatan Sabak Auh

c. Data Penduduk Kecamatan Sabak Auh

Data penduduk di Kecamatan Sabak Auh menunjukkan jumlah KK terbesar adalah pada desa Sungai Tengah sebanyak 552 KK dengan jumlah RT sebanyak 17 RT dengan 7 RW, disusul desa Rempak dengan jumlah 430 KK dengan jumlah 15 RT dengan 6 RW. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II.4
DATA PENDUDUK KECAMATAN SABAK AUH TERHITUNG
BULAN OKTOBER 2012

No	Nama Desa	Jumlah					
		RT	RW	KK	Jiwa		
					L	P	Jumlah
1	Rempak	15	6	430	841	887	1728
2	Laksamana	9	4	312	605	540	1145
3	Belading	8	6	309	569	541	1110
4	Bandar Sungai	10	5	267	573	523	1096
5	Sungai Tengah	17	7	552	1077	1046	2123
6	Sabak Permai	12	6	351	775	727	1502
7	Bandar Pedada	8	4	253	560	515	1075
8	Selat Guntung	12	4	272	576	544	1120
	Jumlah	91	42	2746	5576	5323	10899

Sumber: Kabag. Administrasi dan Pemerintahan Kecamatan Sabak Auh

3. Rekapitulasi Administrasi Wilayah Kecamatan Sabak Auh

TABEL II.5
REKAPITULASI ADMINISTRASI WILAYAH KECAMATAN
SABAK AUH TERHITUNG BULAN OKTOBER 2012

No	Kode Kec.	Nama Kec.	Kode Desa/Kel	Nama Desa/Kel	Jumlah	
					RW	RT
1	12	Sabak Auh	1	Rempak	6	15
2			2	Laksamana	4	9
3			3	Belading	6	8
4			4	Bandar Sungai	5	10
5			5	Sungai Tengah	7	17
6			6	Sabak Permai	6	12
7			7	Bandar Pedada	4	8
8			8	Selat Guntung	4	12
Jumlah					42	91

Sumber: Kabag. Administrasi dan Pemerintahan Kecamatan Sabak Auh

B. Sosial Pendidikan

Pendidikan di Kecamatan Sabak Auh terus-menerus mengalami perkembangan, sesuai dengan pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan

bahwa “*setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.*”¹⁸ Maka dalam pelaksanaannya pemerintah telah membentuk suatu sistem pendidikan dan pengajaran nasional yang dikenal dengan pendidikan formal dan pendidikan non formal.

Lembaga pendidikan yang ada di Kecamatan Sabak Auh terdiri dari lembaga pendidikan agama dan umum, yang terdiri dari, SD, SLTP dan SMA untuk bidang pendidikan umum, sedangkan untuk pendidikan agama terdiri Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah. Untuk lebih jelasnya wadah pendidikan formal di Kecamatan Sabak Auh dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL II.6
SARANA PENDIDIKAN KECAMATAN SABAK AUH TAHUN 2011

No	Jenis Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
1	SMA	1	-	1
2	MA		2	2
3	SMP	3		3
4	MTS		2	2
5	SD	10		10
6	MI		2	2
	Jumlah	14	6	20

Sumber : Data Statistik Kecamatan Sabak Auh 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Sabak Auh berjumlah 20 buah dengan perincian jenis sekolah 14 sekolah yang berstatus negeri dan 6 sekolah yang dikelola oleh swasta. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk sebanyak 10899 jiwa, maka jumlah sarana pendidikan tersebut sudah bisa dikatakan cukup memadai.

¹⁸ UUD 1945, Amandemen I, II, III, IV (Jakarta: Sandro Jaya), Cet. ke-1, h. 22

Adapun tingkat pendidikan yang ada pada masyarakat yang ada di Kecamatan Sabak Auh dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL II.7
TINGKAT PENDIDIKAN KECAMATAN SABAK AUH TAHUN 2012

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Belum sekolah	1738	16.24%
2	Tidak tamat sekolah	930	8.69%
3	Tamat SD	2473	23.11%
4	Tamat SLTP	2353	21.99%
5	Tamat SLTA	2715	25.37%
6	Tamat akademi	228	2.13%
7	Tamat perguruan tinggi	166	1.55%
8	Buta huruf	97	0.91%
	Jumlah	10700	100%

Sumber : Data Statistik Kecamatan Sabak Auh 2012

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Sabak Auh sangat beragam. Ada yang tidak sekolah sebanyak 1738 jiwa atau 16.24%, tidak tamat sekolah sebanyak 930 jiwa atau 8.69%, tamat SD sebanyak 2473 jiwa atau 13.11%, tamat SLTP sebanyak 2353 jiwa atau 21.99%, tamat SLTA sebanyak 2715 jiwa atau 25.37%, tamat akademis atau sederajat sebanyak 228 jiwa atau 2.13%, tamat perguruan tinggi sebanyak 166 jiwa atau 1.55%, dan yang terakhir yaitu buta huruf sebanyak 97 jiwa atau 0.91%.

Dari realita di atas memang menunjukkan bahwa kesadaran untuk melanjutkan sekolah di daerah Kecamatan Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura Riau umumnya masih tergolong rendah, ditambah lagi kurang didukung oleh sarana dan prasarana pendidikan serta letak geografisnya yang kurang strategis, karena dari daerah untuk menuju ke kota harus menempuh jarak yang begitu jauh. Walaupun demikian adanya,

gelombang perubahan secara perlahan-lahan juga mewarnai masyarakat Kecamatan Sabak Auh, dan termasuk di dunia pendidikan.

C. Sosial Keagamaan

Kehidupan beragama di Kecamatan Sabak Auh cukup baik, hal ini tercermin dari kerukunan antar umat beragama. Adapun agama yang terdapat di Kecamatan Sabak Auh dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II.8
JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN SABAK AUH
MENURUT AGAMA TAHUN 2012

No	Agama	Frekuensi	Persentase
1	Islam	10451	97.67%
2	Kristen katolik	31	0.29%
3	Kriten protestan	29	0.27%
4	Hindu	-	-
5	Bhuda	189	1.77%
	Jumlah	10700	100.00%

Sumber : Data Statistik Kecamatan Sabak Auh 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penganut agama yang terbesar adalah penganut agama Islam yang mencapai 10451 jiwa atau 97.67%, kemudian disusul oleh agama Kristen 60 jiwa yang terbagi menjadi dua Kristen katolik sebanyak 31 jiwa atau 0.29% dan Kristen Protestan 29 jiwa atau 0.27%. Sedangkan agama Bhuda sebanyak 189 jiwa atau 1.77%.. Oleh karena itu, umat Islam penganut agama mayoritas di Kecamatan Sabak Auh, menyebabkan kehidupan dan kegiatan agama yang menonjol adalah agama Islam, baik itu dalam bentuk peribadatan, perayaan maupun dalam kegiatan sosial.

Selain itu dengan banyaknya penganut agama Islam dari agama lain di Kecamatan Sabak Auh, menyebabkan sarana peribadatan agama Islam lebih

banyak dibandingkan dengan sarana peribadatan yang dimiliki oleh agama lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL II.9
SARANA PERIBADATAN DI KECAMATAN SABAK AUH
TAHUN 2012

No	Desa	Masjid	Musholla	Gereja	Jumlah	Ket.
1	Rempak	1	3		4	Aktif
2	Laksamana	3	4		7	Aktif
3	Belading	3	5		8	Aktif
4	Bandar Sungai	4	3		7	Aktif
5	Sungai Tengah	5	4		9	Aktif
6	Sabak Permai	3	3		6	Aktif
7	Bandar Pedada	0	4	1	5	Aktif
8	Selat Guntung	2			2	Aktif
	Jumlah	21	26	1	48	

Sumber : Data Statistik Kecamatan Sabak Auh 2012

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana peribadatan yang paling banyak di Kecamatan Sabak Auh adalah umat Islam yaitu 21 buah masjid dan 26 musholla serta 1 buah gereja yang terletak di beberapa desa. Desa Rempak 1 buah masjid dengan 3 musholla, desa Laksamana 3 buah masjid dengan 4 buah musholla, desa Belading 3 buah masjid dengan 5 buah musholla, desa Bandar Sungai 4 buah masjid dengan 3 buah musholla, desa Sungai Tengah 5 buah masjid dengan 4 buah musholla, desa Sabak Permai 3 buah masjid dengan 3 buah musholla, desa Bandar Pedada 4 buah musholla serta desa Selat Guntung 2 masjid dengan 1 buah gereja. Oleh sebab itu, mayoritas agama yang ada di kecamatan Sabak Auh adalah Islam sehingga sarana peribadatan sangatlah banyak.

Kecamatan Sabak Auh mayoritasnya suku Jawa, dan sebagian orang mengidentikkan orang yang berasal dari pulau Jawa itu dengan Islam dan

mempunyai agama yang kuat. Apalagi peran budaya yang ada selalu dibumbui dengan nilai-nilai agama, serta keberadaannya pun masih bisa dirasakan saat ini.

Selain itu masyarakat kecamatan Sabak Auh sangat fanatik terhadap paham mazhab yang dianutnya, kefanatikannya ini terlihat dalam pelaksanaan ibadah sehari-hari. Mazhab Syafi'i yang telah diwariskan oleh pendahulu mereka yang telah terpatri disanubari mereka tanpa mau mengikuti kepada paham Mazhab lainnya seperti Hanafi, Maliki, maupun Hanbali.

Walaupun demikian adanya, dalam menjalankan ibadah terdapat juga masyarakat yang berbeda pandangan agama, namun mereka tidak mempermasalahkannya. Seperti shalat taraweh pada bulan Ramadhan ada yang 11 dan ada yang 23, shalat subuh ada yang memakai qunut dan ada yang tidak memakainya, yang penting bagi mereka adalah menjalankan ibadah dan tidak menyimpang dari ajaran agama Islam.

D. Adat Istiadat

Kecamatan Sabak Auh masyarakatnya berasal dari berbagai suku, adat istiadat yang berbeda seperti ada orang Jawa, Melayu, Batak, Cina, Minang dan lainnya. Oleh sebab itu adat istiadat yang berlaku disana juga beragam, sesuai dengan suku yang mereka anut. Tetapi mereka telah menyatu dengan masyarakat setempat atau dengan masyarakat melayu, tetapi pada acara-acara tertentu mereka masih menggunakan adat istiadat suku mereka seperti pada acara persepsi pernikahan.

E. Sosial Ekonomi

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat Kecamatan Sabak Auh melakukan berbagai macam usaha sebagai mata pencahariannya. Ada beberapa mata pencaharian utama masyarakat Kecamatan Sabak Auh yaitu sebagai pegawai negeri sipil (PNS), pedagang, petani, buruh, pengusaha, dan lain sebagainya.

Sedangkan perbandingan mata pencaharian penduduk Kecamatan Sabak Auh dapat dilihat sebagai berikut:

TABEL II.10
JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN SABAK AUH
BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN TAHUN 2012

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Petani	6689	61.37%
2	Pedagang	1532	14.06%
3	Buruh	750	6.88%
4	Pengusaha	170	1.56%
5	PNS	1129	10.36%
6	POLRI	8	0.07%
7	Tidak bekerja	621	5.70%
	Jumlah	10899	100.00%

Sumber : Data Statistik Kecamatan Sabak Auh 2012

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa penduduk Kecamatan Sabak Auh yang bermata pencaharian terbanyak adalah petani karena kecamatan Sabak Auh merupakan daerah lahan pertanian atau lahan pangan sehingga masyarakat Kecamatan Sabak Auh mayoritas bertani. Dengan perincian petani 6682 jiwa atau 61.37%, pedagang 1532 jiwa atau 14.06%, Pegawai Negeri Sipil (PNS) 1129 jiwa atau 10.36%, buruh 750 jiwa atau 6.88%, tidak bekerja 621 jiwa atau 5.70%, pengusaha 170 jiwa atau 1.56%, POLRI 8 jiwa atau 0.07% dari penduduk yang ada.

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Sabak Auh bermata pencaharian sebagian besar adalah petani. Mayoritas yang ditanam oleh masyarakat petani tersebut sebagian besar adalah sawit, dan padi.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TRADISI LARANGAN NIKAH LUSAN BESAN DAN NIKAH MENURUT SYARIAT ISLAM

A. Tradisi Larangan Nikah Lusan Besan Bagi Masyarakat Suku Jawa

Pandangan masyarakat Jawa tentang kehidupan mengatakan bahwa antara masyarakat dan alam merupakan lingkungan kehidupan sejak lahir. Masyarakat sebagai perwujudan kumpulan keluarga besar, bermula atau berwal dari keluarga kecil (sendiri), keluarga tetangga, baik yang dekat maupun yang jauh dan akhirnya seluruh desa atau kelurahan. Lingkungan ini diatur dengan berbagai norma dan adat, sehingga akhirnya setiap anggota akan menemukan identitasnya dan keamanan jiwa. Bila anggota masyarakat terpisah dari aturan diatas, maka mereka merasa dikucilkan, sendirian, dan seolah-olah hidupnya tanpa makna.

Masyarakat bagi orang Jawa merupakan sumber rasa aman. Begitu pula alam, dihayati sebagai kekuasaan yang menentukan keselamatan dan kehancurannya. Oleh karena itu, alam dan indrawi bagi orang Jawa merupakan ungkapan alam ghaib, yaitu misteri yang berkuasa yang mengiringinya, dan darinya akan diperoleh eksistensinya, sebab alam merupakan ungkapan kekuasaan yang menentukan kehidupannya yang penting, misalnya kelahiran, puputan, tetesan, khitanan, perkawinan, kehamilan, proses penuaan dan kematian.¹⁹

¹⁹H. Abdul Jamil, dkk., *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gema Media, 2000), Cet. ke-1, h. 69.

Dikarenakan alam adalah ungkapan kekuasaan yang menentukan manusia maka dalam masyarakat Jawa untuk melangsungkan suatu pernikahan harus ditetapkan tradisi tertentu yang diyakini akan ikut memberikan keberuntungan serta menghindari yang akan dapat berakibat kerugian.

Perkawinan menurut masyarakat Jawa adalah sesuatu yang sakral, agung, dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Karena itu, perkawinan bukan hanya sekedar mengikuti Agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga dalam ikatan hubungan yang sah antara pria dan wanita, namun juga memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan rumah tangga seperti yang dicita-citakan.²⁰

Dalam tradisi masyarakat Jawa ada tradisi larangan menikah (larangan menerima mantu). Adapun tradisi yang dimaksud adalah larangan nikah lusan besan. Nikah *lusan besan ialah* "orang tua pihak laki-laki yang sudah menikahkan anak kandungnya sebanyak dua kali, sedangkan orang tua pihak perempuan baru satu sekali. Dari situlah istilah tradisi lusan besan itu ada. Jika ada dua orang dikarnakan lusan besan melakukan pernikahan maka pernikahan tersebut dilarang dan tidak boleh dilakukan ditempat tinggalnya, pernikahan tersebut harus dilakukan di luar daerah tempat tinggalnya, dan wali dari pihak perempuan tidak menjadi wali nikah. mereka menganggap tradisi ini sangat sakral oleh sebab itu, masyarakat Jawa enggan untuk melangsungkan suatu

²⁰Artatati Agus, *Kiat Sukses Menyenggarakan Pesta Perkawinan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), Cet. ke-1, h. 1.

pernikahan anaknya. Untuk melaksanakan suatu perkawinan, yang mana ditentukan oleh orang yang dituakan biasanya orang Jawa memanggilnya dengan sebutan “Mbah”.

Tradisi ini tidak ada yang mengetahui kapan munculnya, akan tetapi tradisi ini sudah ada sejak dahulu sewaktu nenek moyang masyarakat Jawa masih hidup. Adapun penyebab dilarangnya melaksanakan pernikahan lusan besan, Diyakini pengantin atau keluarganya akan mendapatkan musibah kesengsaraan, meninggal dunia, cerai, dan lain-lain sebagainya.

Menurut Bapak Semo nikah lusan besan bisa dikatakan sebagai salah nikah yang sangat terlarang bahkan terlihat sumbang dalam masyarakat jika terjadi, sehingga akan menjadi bahan pembicaraan orang.

Nasib baik dan nasib kurang baik sebenarnya bukanlah masalah adat, itu sebenarnya adalah masalah takdir. Akan tetapi karena kebiasaan yang terjadi di dalam kehidupan seolah-olah takdir dapat dikatakan sebagai adat istiadat. Sebab dalam kehidupan selalu diikuti oleh garis hidup dan takdir.²¹

Dalam pernikahan lusan besan tersebut dalam ukuran adat hal ini dipandang sebagai suatu perbuatan yang tabu dimata masyarakat, karena nantinya akan diikuti oleh ketentuan-ketentuan takdir yang tidak diinginkan. Bagi anak yang tetap melakukan pernikahan lusan besan maka mau tidak mau salah satu harus terima orang tuanya dari pihak perempuan tidak menjadi wali

²¹Semo, Tokok Adat, *Wawancara*, desa Belading , 8 Agustus 2011.

dan harus menikah di luar tempat tinggalnya di dalam pelaksanaan pernikahannya untuk menghindari kualat yang akan menyimpannya.

Menurut Bapak Tumiran bahwa nikah lusan besan itu dilarang karena akan menimbulkan hal-hal yang negatif dimata masyarakat. Selain menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak tersebut masyarakat akan memandang hal tersebut sebagai peristiwa misterius karena hal itu jarang terjadi di kalangan masyarakat. Kemudian mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan meskipun ia telah berusaha keras dalam membina kehidupan rumah tangga.

Namun menurutnya pernikahan yang dilakukan semacam itu bukan berarti telah merusak pernikahan sehingga menjadi tidak sah. Menurutya pernikahan tetap sah hanya saja akan memberi dampak buruk kepada keluarga itu sendiri.²²

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nikah lusan besan merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh adat. Namun menurut peraturan hukum Islam pernikahan semacam itu tidaklah menjadi sebab masalah meski nantinya akan menimbulkan dampak-dampak yang buruk dan malapetaka bagi kedua belah pihak dan keluarga. Sebab dalam kehidupan ini suatu yang dilarang pasti ada sebabnya dan apabila dilanggar pasti ada akibatnya dan suatu yang disuruh itu karena ada hikmah dan manfaatnya.

²²Tumiran, Tokok Masyarakat, *Wawancara*, desa Laksamana, 9 Agustus 2011.

Pelangaran terhadap hukum adat kadang kala harus memutuskan hubungan persaudaraan sesama keluarga dan masalah-masalah lain. padahal hukum Islam sendiri tidak pernah memandang bahwa adat itu harus dipertahankan sebagai mana mestinya. Meskipun pelanggaran adat ini tidak akan mendapat ancaman dan hukuman seperti hukum Islam, namun dalam kehidupan yang masih kuat dengan adat istiadat pelanggaran tersebut merupakan suatu hal yang sangat vatal dimata masyarakat, bagi orang yang melanggar aturan adat maka ia akan dicap sebagai orang yang tidak beradat.

Jika seseorang telah dikatakan sebagai orang yang tidak beradat maka orang tersebut tidak lagi ada harga dirinya dimata masyarakat. Ia akan menjadi orang yang terkucil dan asing bagi masyarakat sekelilingnya.

Begitu kuatnya pengaruh adat dalam kehidupan sehingga dalam pelaksanaan sesuatu kadang-kadang masyarakat harus mempertimbangkan dan mengetahui sisi positif dan negatifnya terlebih dahulu.

B. Pengertian Nikah Menurut Syariat Islam

Nikah berasal dari bahasa Arab - **ينكح** - Menurut bahasa yaitu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri. Dalam kitab-kitab fiqh dinyatakan bahwa nikah menurut bahasa memiliki arti hakiki dan arti majazi. Menurut arti hakiki nikah adalah “bergabung” atau “bercampur” sedangkan arti majazinya adalah “bersetubuh”

²³ Sedangkan menurut istilah para ulama berbeda pendapat dalam memberikan pengertian nikah sebagai berikut :

1. Abu Zahra dalam kitab *al-Ahwal al-Syakhsyah* mendefenisikan nikah adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita yang saling mencintai, saling membantu, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.²⁴
2. Prof. Dr. Hazairin mendefenisikan bahwa inti dari perkawinan itu adalah hubungan seksual menurut beliau tidak ada, kecuali akad nikah (perkawinan).²⁵
3. T.M. Hasbi Ash Shiddiqy berpendapat bahwa pernikahan adalah melaksanakan akad yang dijalin dengan pengakuan kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan atas kerelaan kedua belah pihak yang berdasarkan sifat yang ditentukan syara' untuk menghalalkan hidup berumah tangga dan menjadikan seseorang cenderung kepada yang lain.²⁶
4. Golongan *Hafiyyah* mengartikan nikah dengan akad yang untuk memiliki kemanfaatan atas sesuatu yang menyenangkan yang dilakukan dengan

²³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), cet. ke -3, h. 35.

²⁴ M. Abu Zahra, *al-Ahwal al-Syahshiyah*, (Mesir: Dar Al-Fikri 1967), Cet. ke-3, h. 8.

²⁵ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Tinta Mas, 1961), Cet. ke-5, h. 61.

²⁶ T. M Hasbi Ash-Shiddiqi, *al-Islam*, (Jakarta : Bulan, 1997), Cet. ke-2, Jilid 2, h. 245.

sengaja, berarti seseorang dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badanya untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan.²⁷

5. Golongan Malikiyah pernikahan diartikan dengan akad yang mengandung sesuatu yang berarti mut'ah atau untuk mencapai kepuasan dengan tidak diwajibkan adanya harga
6. Golongan Syafi'yyah mengartikan dengan akad yang mengandung pemilikan untuk melakukan persetubuhan yang diungkapkan dengan kata-kata ankaha atau tazwij atau dengan kata-kata lain yang disamakan dengan keduanya. Imam syafi'i mengartikan dengan akad yang diucapkan antara wali pihak perempuan dan kabul dari pihak laki-laki.²⁸
7. Menurut UU. No. 1 1974 (pasal 1) perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.)²⁹

Dari beberapa pengertian nikah di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditentukan syara' untuk

²⁷Salamat Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet. ke-1, h. 9

²⁸*Ibid.*

²⁹Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan PP.9 Tahun 1975, (Semarang: Aneka Ilmu, 1990), Cet. ke-1, h.1.

menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan dan memenuhi dalam kehidupan rumah tangga.

C. Dasar dan Hukum Nikah

1. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan kodrat alamiah dan sunnatullah yang diatur sedemikian rupa melalui hukum dan syarat yang ditentukan, hukum Islam telah memberikan pedoman dan ketetapan-ketetapan tentang dasar perkawinan (munakahat) hal ini dapat ditemukan sumbernya dalam al-Qur'an maupun hadist seperti tersebut di bawah ini:

a. Surat an-Nisa (4) : 1.

فَاذْكُرُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ لَكُمُ الْوَسْلَةَ مِنْ بَيْنِكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ لَكُمُ الْوَسْلَةَ مِنْ بَيْنِكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ لَكُمُ الْوَسْلَةَ مِنْ بَيْنِكُمْ

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istri baginya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertaqwalah kepada Allah yang menggunakan namanya kamu minta satu sama yang lain. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.³⁰

b. Surat an-Nisa (4) : 3

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَهْرُغُوا فِي أَسْمَاءِ بَنَاتِكُمْ الَّتِي هُنَّ مِنْكُمْ وَاللَّيَالِي عَظِيمَةٌ وَلَا تُسْلُوا عَنْهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

³⁰Depag RI, *op. cit.*, h. 111.



Artinya : “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bilamana kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senang, dua, tiga, empat tapi jika kamu takut tidak akan berlaku adil maka kawinilah satu orang saja. dan budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat zalim.”³¹

c. Surat az-Zariyat (51) : 49,



Artinya : “Dan segala sesuatu yang telah kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaranku”.

d. Surat an-Nur (24) : 32,



Artinya : “Dan nikahilah orang-orang yang sendirian diantara kamu orang yang layak kawin dari hamba kamu baik dari laki-laki maupun perempuan, apabila perempuan itu miskin, maka Allah akan memampukan mereka dari karunianya. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui”.³²

e. Dalam hadits Rasulullah bersabda :

الله رضى الله عنه : لىارسول الله صلى الله عليه
يامعشر الشباب الباءة فليتزوج فانه
يستطع فعليه فانه لهوجاء متفق عليه

³¹*Ibid*, h. 115.

³²*Ibid*, h. 869.

Artinya : “Dari Abdullah bin Mas’ud ra. Dia bersabda : wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin, maka hendaklah ia kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu maka hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu bisa membentengi diri.” (HR. Bukhari)

عن انس بن مالك رضى الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج انبي صلى الله على وسلم, عن عبادة انبي فلم اخبروا كما نهم تقالوها فقالوا: واين نحن من انبي . قد غفر له ما تقدم زنبه وما تاخر قال احد هم اما انا فان اصل الل, ابدأ, وقال اخر انا اصوم ولا افطر وقال اخر انا اعتزل ا النساء فلا اتزوج ابدأ, فجاء ا لنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال انتم , الذ ين قلتم كذا وكذا اما والله اني لا خشاكم الله اتقاكم له لكن اصوم, وافطر واصلى وانام, واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. (رواه البخاري)

Artinya : “Dari Anas bin Malik r.a berkata: ada tiga orang laki-laki dating berkunjung kerumah istri-istri Nabi SAW. Bertanya tentang ibadah beliau. Setelah di terangkan kepada mereka, kelihatan bahwa mereka menganggap bahwa apa yang di lakukan Nabi itu terlalu sedikit, mereka berkata: kita tidak bisa di samakan dengan Nabi, semua dosa beliau yang telah di ampuni allah “ salah dari seorang mereka berkata; untuk saya, saya akan selalu sembayang sepanjang malam selamanya.” Orang kedua berkata:” aku akan berpuasa setiap hari, tidak pernah berbuka, orang ketiga berkata:” saya tidak akan pernah mendekati wanita, saya tidak akan nikah selamanya, setelah itu Rasulullah SAW, datang beliau berkata: kamukah yang berkata begini begitu? Demi allah saya lebih takut bertakwa kepada tuhan di bandingkan dengan kamu, tetapi saya berpuasa, dan berbuka, saya sembayang dan tidur, dan saya menikahi wanita, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia bukan dari umatku.” (HR. Bukhori)³³

³³Imam Bukhori, *al-Bukhori*, (tt, Dar-al-Fik, 1981), Cet. ke-4, Jilid V, h. 117.

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تتكح المرأة لاربعة لما لها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (رواه البخاري)

Artinya :“Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw bersabda, nikahilah perempuan karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka nikahilah karena agamanya maka akan selamatlah kamu.”³⁴

2. Hukum Perkawinan

Dasar hukum melakukan perkawinan menurut pendapat sebahagian fuqaha’ adalah mubah atau ibahah. Namun dasar hukum melakukan perkawinan yang mubah tersebut dapat berubah berdasarkan sebab-sebab (illatnya) yakni dapat berubah menjadi makruh, sunnah, mubah, wajib dan haram.³⁵ Berdasarkan sebab-sebab tersebut hukum perkawinan dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Makruh

Seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk menikah, walaupun belum sangat mendesak tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga dia menikah hanya akan membawa kesengsaraan istri dan anak-anaknya maka makruhlah baginya untuk menikah. Tetapi andaikan dia menikah juga tidak berdosa atau tidak pula berpahala, sedangkan apabila tidak menikah dengan pertimbangan kemaslahatan maka dia mendapat pahala. Demikian juga bagi wanita,

³⁴Shahih Bukhori, *Penerjemaah oleh Zainuddin Hamid*, (Jakarta: Ijayah, 1980), Cet. ke-1, h. 312.

³⁵M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), Cet. ke-7, h. 21.

meskipun diketahui dia telah wajar untuk menikah tetapi dia belum sanggup menjalankan kewajiban seorang istri maka makruh baginya untuk menikah.

b. Sunnah

Dipandang dari segi pertumbuhan fisik atau jasmani seseorang pria itu telah wajar dan berkeinginan untuk menikah, sedangkan baginya ada biaya sekedar untuk hidup sederhana. Maka baginya sunnah untuk melakukan pernikahan andaikata dia menikah mendapat pahala dan tidak berdosa jika tidak atau belum menikah.

Bagi wanita yang belum punya keinginan untuk menikah tetapi dia membutuhkan perlindungan atau nafkah dari seorang suami maka sunnah baginya nikah.

c. Mubah

Bagi laki-laki yang tidak terdesak dengan alasan yang mewajibkan segera menikah atau alasan yang menyebabkan ia harus menikah, maka hukumnya mubah. Imam Hambali mengatakan bahwa mubah hukumnya bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah.

d. Wajib

Apabila seorang pria dipandang dari segi fisik atau jasmaninya sudah sangat mendesak untuk menikah, sedangkan dari segi biaya kehidupan telah mampu dan mencukupi sehingga kalau dia tidak menikah mengkhawatirkan dirinya akan terjerumus kedalam

perzinahan, maka wajiblah baginya menikah. Bila mana dia tidak menikah akan berdosa di sisi Allah. Demikian juga wanita yang tidak dapat mengendalikan diri dari perbuatan orang jahat bila tidak menikah maka wajiblah baginya untuk menikah.³⁶

e. Haram

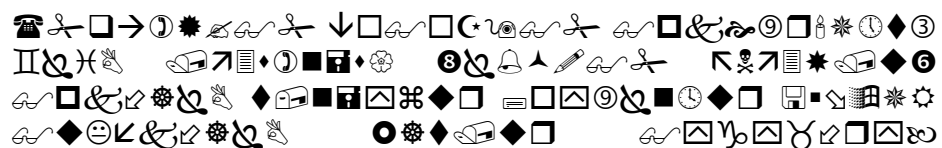
Bila seorang pria atau wanita tidak bermaksud akan menjalankan kewajiban sebagai suami istri, atau seorang pria ingin menganiaya wanita atau sebaliknya ingin memperolok-olokan pasangannya, dan yang dipastikan dia tidak akan mampu memberi nafkah kepada istrinya (dan keluarganya) baik secara lahir maupun batin, maka haramlah yang bersangkutan untuk menikah.³⁷

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Ada beberapa tujuan dan hikmah perkawinan atas umat Islam, diantaranya :

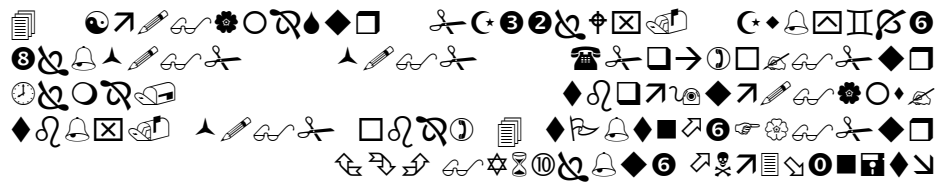
- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi masyarakat generasi yang akan datang.

Sebagai mana firman Allah SWT di dalam al-Qur'an surat an-Nisa (4:1,



³⁶Sulaiman Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Solo: Aqwam Media Profetike 2010), Cet. ke-1, h. 412.

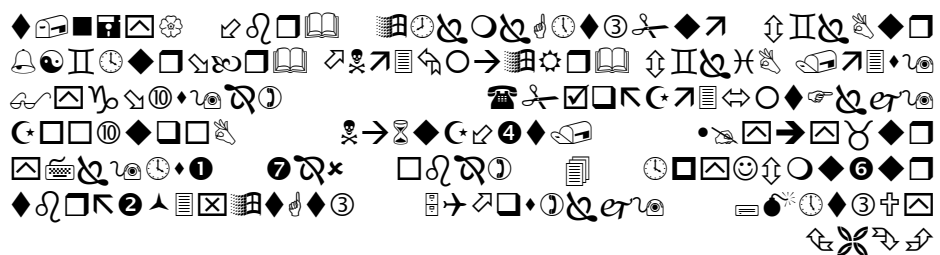
³⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Penerjemah Oleh Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala, 2011), Cet. ke-2, Jilid 3, h. 210.



Artinya : “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak kamu suka, dan bertaqwalah kepada Allah dengan mempergunakan nama-Nya aling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.³⁸

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan dan rasa kasih sayang.

Hal ini dijelaskan didalam surat ar-Rum(30) : 21,



Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”³⁹.

Islam mengajarkan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik pada pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan dapat membuahkan, diantaranya talikekeluargaan,

³⁸Depag RI, *op.cit.*, h. 114.

³⁹ *Ibid.*

memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan masyarakat, yang oleh Islam direstui, ditompang, dan di tunjang, karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.⁴⁰

D. Rukun dan Syarat Nikah

Islam adalah agama yang lengkap, segala gerak manusia sudah ditentukan oleh syariat yang telah ditentukan Allah SWT, termasuk dalam hal perkawinan⁴¹. Maka di dalam hukum Islam pernikahan baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut.

1. Calon suami, dengan syarat:
 - a. Bukan muhrim.
 - b. Tidak dipaksa.
 - c. Jelas laki-laki, sehingga tidak sah menikahi orang yang belum jelas sifat laki-lakinya.
2. Calon istri, dengan syarat:
 - a. bukan muhrimah.
 - b. Jelas sifat wanitanya.
 - c. Sudah tertentu.
 - d. Tidak dalam ikatan /iddah orang lain.
3. Wali, yaitu dari pihak calon pengantin wanita atau wakilnya.

⁴⁰Muhammd Jasmi Sukma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Cet. ke-2, h. 134.

⁴¹Selamet Abidin Dan Aminudin, *op.cit.*, h. 63.

4. Dua orang saksi: Sebuah pernikahan tidak akan pernah sah tanpa adanya wali dari pihak wanita, dan dua saksi. Syarat-syarat dari keduanya adalah:

- a. Islam.
- b. Baligh.
- c. Berakal.
- d. Laki-laki.
- e. Adil.⁴²

5. Shighat (transaksi), dengan syarat:

- a. Harus dengan ungkapan yang sharih (jelas), tidak boleh dengan kinayah. pelaksanaan ijab harus dilakukan walinya sendiri atau di wakikan.
- b. Harus bersambung (mutasil) antara lafadz ijab dan qobul, maksudnya tidak ada selinngan di antarakeduanya.
- c. Tidak dita'liqkan (digantungkan)
- d. Tidak dibatasi dengan waktu.

6. Mahar

Mahar (mas kawin) adalah wajib sedangkan dalam menyebutkan dalam akad hukumnya adalah sunnah. Sebaiknya maskawin itu adalah:

- a. Mahar itu tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal.
- b. Suami yang menyetubuhi istrinya sebelum ia tahu besar kecilnya mahar wajib membayar mahar misil.

⁴²H.M.A. Tihami, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), Cet. ke-2, h. 12.

- c. Jika kalau mahar rusak sebelum diterima maka istri boleh memilih antara rusak dan sahnya mahar.
- d. Mahar diharuskan dari sesuatu yang bisa mobi' (barang yang bisa dijual.)⁴³

7. Rukun

Menurut Syafi'i menyatakan bahwa rukun Nikah itu ada lima yaitu:

- a. Suami
- b. Istri
- c. Wali
- d. Sighat dan
- e. Dua orang saksi⁴⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14 rukun nikah ada lima yaitu:

- a. Calon Suami
- b. Calon Istri. Bagi calon kedua mempelai harus memenuhi persyaratan:
 - 1) Harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 7 UU.NO. 1 tahun 1974, yakni kedua calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri 16 tahun.

⁴³*Ibid.*, h. 14.

⁴⁴Husain al Bahresy, *Pedoman Fiqh Islam*, (Surabaya: al-Ikhlâs, 1981), Cet. ke-1, h. 230.

- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2,3,4 dan 5 UU.No 1 tahun 1974.
- c. Wali nikah. Bagi wali nikah harus memiliki syarat sebagai berikut:
- 1) Yang bertindak sebagai wali ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim dan Aqil baligh
 - 2) Wali nikah terdiri dari nasab dan wali hakim
- d. Dua orang saksi
- 1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah
 - 2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi
 - 3) Adapun yang di tunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu dan tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta mendatangi akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah berlangsung.
- e. Ijab dan kabul.
- Ijab dan qobul antara dua calon, mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Yang berhak mengucapkan qobul adalah calon mempelai pria secara pribadi. Dalam hal-hal tertentu ucapan qobul nikah dapat di wakilkkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria mermberi kuasa yang tegas secara

tertulis bahwa penerimaan wakil atas nikah itu adalah untuk mempelai pria.⁴⁵

E. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan

1. Pengertian Wali

Secara etimologi wali berasal dari kata (ولاية) yang dalam istilah fiqh disebut wilayah berarti penguasaan dan perlindungan.⁴⁶ Didalam ensiklopedia hukum Islam dikatakan bahwa sangat erat kaitannya dengan asal kata (ليا - ولاية) berarti kekuasaan, pemerintahan, atau kekuasaan seseorang gubernur pada sebuah wilayah atau propinsi.⁴⁷

Sedangkan secara istilah, wali adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada orang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Sedangkan orang diberikan kekuasaan perwalian disebut wali.⁴⁸

Didalam pernikahan, pernikahan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas golongan yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatan sendiri. Menurut Sayyid Sabiq, wali adalah suatu ketentuan

⁴⁵Munawir Sjadzali, *Kompilasi Hukum Islam*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), Cet. ke-2, h. 24.

⁴⁶Muhammad Jasmi Sukma, *op.cit.*, h. 134.

⁴⁷Grill Glass, *Enklopedi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), Cet. ke-2, h. 429

⁴⁸Muhammad Jasmi Sukma, *op.cit.*, h. 136.

hukum yang didapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.⁴⁹

Para ulama berbeda pendapat dalam memposisikan wali dalam pernikahan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan berada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh menikahkan janda itu tanpa persetujuannya, sebaliknya wanita itu juga tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa persetujuan dan restu sang wali. Ketentuan ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إياما أم
نكحت بغير إذن يها فنكحها باطل , فنكحها باطل , فنكحها باطل
, بها , فلها المهر بما استحل من فرجها فإذن استجرو
ن ولي من لا ولي له (رواه الخمسة إلا النسائي)

Artinya : dari Aisyah ra, Rasulullah SAW bersabda “wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, apabila suami telah mengaulinya, maka istri berhak menerima mahar sekedar mengahalalkan farjinya. Apabila walinya enggan memberikan izin, maka wali hakimlah yang menjadi wali perempuan yang dianggap tidak memiliki wali.⁵⁰

Sementara Imam Hanafi mengatakan bahwa wanita yang baligh dan berakal sehat boleh memilih suaminya sendiri dan boleh pula

⁴⁹Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 13.

⁵⁰Al Imam asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Alih Bahasa Oleh Hamidi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. ke-3, Jilid 5, h. 404.

melakukan akad nikah sendiri, baik itu yang perawan maupun janda, dengan syarat orang yang dipilihnya itu sepadan (sekufu) dengannya dan maharnya yaitu tidak kurang dari mahar mitsil. Tetapi jika ia memilih suami yang tidak sepadan dengannya dan maharnya itu kurang dari mahar mitsil, maka wali berhak untuk menentang dan meminta kepada qhadi untuk membatalkan akad nikahnya.

Imam Malik mengatakan, nikah tanpa wali boleh menikah oleh wanita yang hina, namun tidak boleh dilakukan oleh wanita yang mulia.⁵¹ Sedangkan mayoritas ulama Imamiyyah berpendapat bahwa seorang wanita yang sudah baligh dan berakal sehat disebabkan oleh kebalighan dan kematangan itu berhak melakukan segala bentuk transaksi termasuk juga dalam soal pernikahan, baik itu masih perawan maupun sudah janda. Baik punya wali atau tidak, direstui atau tidak, kawin dengan kalangan bangsawan atau dengan rakyat jelata, mempunyai kelas sosial tinggi maupun rendah, tidak seorangpun yang dapat menghalang-halangi. Ia mempunyai hak yang sama persis seperti kaum laki-laki. Penganut Imamiyyah berargumen dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 232.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَكُن لَكُمْ مَخْرُجٌ مِنْهُنَّ فَتُحْبَسُوا فَإِنَّ فِي النِّكَاحِ عِلْقًا مِمَّا بَيْنَ الْأَافْقِ ۖ وَتُحْبَسُ الْمُتَنكِحَاتُ لِكَيْ يُحَبِّصَ لَهُنَّ الْوُجُوهُ لَا يُحَرِّمَهُنَّ عَلَىٰ أَنْ يَتَزَوَّجُوا بِأَمْوَالِهِنَّ لِكَيْ لَا يَكُونَ حَرَسُهُنَّ عَرَقًا ۚ إِنَّكُمْ أَعْيُنُكُمْ إِنَّمَا يَنْتَظِرُ لِكَيْلِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝﴾

⁵¹Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2001), Cet, ke-2, h. 48.

Artinya :“Maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya”.⁵²

Meskipun terdapat perbedaan pendapat terjadi dikalangan ulama, namun mereka tidak menolak wali sebagai orang yang harus hadir dan sangat diperlukan didalam pernikahan. Bahkan mereka sepakat apabila anak perempuan yang menikah tanpa sepengetahuan wali dan ternyata calon suami tersebut tidak sekufu, maka wali berhak meminta kepada qhadi untuk membatalkan pernikahan yang dilaksanakan.

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 19, dikatakan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.⁵³

Dari ayat dan hadist di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, wali adalah wajib untuk dihadirkan sewaktu akad nikah diucapkan. Wali adalah suatu ketentuan hukum syara yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali dalam suatu pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkan kepada orang lain.⁵⁴

2. Orang Yang Berhak Menjadi Wali

⁵²Depag RI, *op.cit.*, h. 56.

⁵³H. Munawir Sjadzali, *loc.cit.*

⁵⁴Jaman Nur, *Fiqih Munakat*, (Semarang: Toha Putra, 1993), Cet. ke-3, h. 67.

Ada beberapa macam orang yang dapat bertindak sebagai wali nikah yaitu:

- a. Wali nasab, yaitu wali yang hak perwaliannya disebabkan adanya hubungan darah. Ini bisa orang tua kandung dan bisa wali aqrab dan ab'ad (saudara dekat dan jauh). Wali nasab ini sendiri terdiri dari empat kelompok, urutan kedudukan kelompok yang lain berdasarkan erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka. Kelompok ketiga adalah kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka. Kelompok keempat adalah saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah, kakek, keturunan anak laki-laki mereka.

Apabila dalam suatu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak adalah menjadi wali adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

Apabila dalam suatu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. Apabila dalam suatu kelompok, derajat kekerabatannya sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat

kerabat seayah, maka mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.⁵⁵

- b. Wali hakim, yaitu wali nasab tidak mungkin untuk dihadirkan atau tidak mau menikahkan lantaran takut atau enggan, maka hakim adalah orang yang bisa menggantikan posisi wali nasab untuk menikahkan seseorang perempuan. Wewenang wali nasab berpindah kepada wali hakim apabila :

- 1) Ada pertentangan di antara wali itu
- 2) Bilamana wali nasab tidak ada atau ada tetapi tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib dan juga enggan.

Syariat Islam menetapkan adanya wali hakim ini adalah untuk menghindari kesukaran pelaksanaan suatu pernikahan. Sedangkan pernikahan itu merupakan suatu kebutuhan dan pelaksanaan itu adalah wajar, karena wanita itu ingin dinikahkan kepada laki-laki yang sepadan dan sanggup membayar mahar mitsil, sedangkan wali nasab tidak ada atau tidak mau menikahkannya. Apabila kedua calon mempelai tidak mau menunda pernikahannya sampai wali nasab ada, maka wali hakimlah yang bertindak sebagai wali nikah.⁵⁶

⁵⁵H. Munawir Sjadjali, *loc.cit.*

⁵⁶Jaman Nur, *op.cit.*, h. 73.

Didalam sebuah hadist disebutkan yang isinya tidak dapat menunda masalah ini manakala sudah wajar, Rasulullah SAW bersabda:

والايم وجدت لها

()

Artinya : “Ada tiga perkara yang tidak boleh ditunda-tunda yaitu shalat bila telah tiba waktunya, jenazah apabila telah siap untuk di kebumikan, dan perempuan bila ia telah ditemukan dengan pasangan yang sepadan (H.R. Baihaqi dari Ali bin Abi Thalib).”⁵⁷

F. Bentuk-bentuk Pernikahan Yang Dilarang

Hukum perkawinan telah diatur sedemikianrupa oleh Syar’i dalam rangka membentuk suatu umat yang ideal. Untuk mencapai tujuan umat yang ideal ini, al-Qur’an dan sunnah menjelaskan macam-macam larangan dalam perkawinan yang dapat dibagi kedalam dua katagori, yang pertama larangan yang bersifat tetap dan larangan yang berlaku sementara.

1. Larangan yang bersifat tetap (muhrim muabbad), yaitu muhrim yang terlarang untuk dinikahi selama-lamanya disebabkan karena nasab, keturunan, musaharoh, dan persusuan.⁵⁸

Adapun larangan kawin karena muhrim Muabbad ini tercantum di dalam al-Qur’an surah an-Nisa (4) :22-23, sebagai berikut :

⁵⁷Al Imam asy- Syaukani, *op.cit.*, h. 406.

⁵⁸Husain al- Bahresy, *Pedoman Fiqh Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1981), Cet. ke-1, h. 230.

Dari ayat di atas, larangan untuk menikahi muhrim dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

a. Sebab Nasab (keturunan) atau adanya pertalian darah yaitu :

- 1) Ibu, nenek dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- 2) Anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah.
- 3) Saudara perempuan baik seayah dan seibu.
- 4) Saudara perempuan ayah, baik sekandung, seayah atau seibu.
- 5) Saudara perempuan ibu baik sekandung, seayah atau seibu.
- 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, seayah atau seibu.
- 7) Anak perempuan dari saudara perempuan baik sekandung, seayah atau seibu.

b. Sebab Mushahah (Persemendaan) karena hubungan kekeluargaan yaitu:

- 1) Istri ayah (ibu tiri) baik sudah digauli atau belum.
- 2) Istri anak atau menantu dan istri cucu, baik cucu dari anak laki-laki atau perempuan, baik istrinya sudah dicampuri atau belum.
- 3) Ibu dari istri atau mertua, baik ibu kandung maupun ibu susuan, baik perempuan tersebut diceraikan sesudah dicampuri atau belum.⁶⁰

c. Sebab Radha'ah (sesusuan) yaitu :

⁶⁰Husain al-Bahresy, *loc.cit.*,

- 1) Ibu yang menyusukan.
 - 2) Anak perempuan dari ibu yang menyusukan.
 - 3) Anak perempuan dari anak perempuan yang menumpang menyusu.
 - 4) Saudara perempuan dari ayah susuan.
 - 5) Saudara ibu perempuan yang menyusui.
 - 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki yang menyusui.
 - 7) Anak perempuan dari ibu (istri bapak susuan).
 - 8) Anak perempuan dari ibu tiri (istri bapak susuan).⁶¹
2. Larangan yang berlaku sementara (*muhrim muwaqqat*), yaitu muhrim yang terlarang kawin dalam jangka waktu tertentu disebabkan adanya hal-hal tertentu yang bila hal tersebut hilang pulalah keharamannya.
- Larangan sementara untuk menikah adalah larangan yang dapat dibatalkan dengan adanya perubahan kondisi. Larangan-larangan kondisional itu adalah sebagai berikut :
- a. Menikahi dua orang perempuan yang bersaudara
- Seorang laki-laki tidak boleh menikahi dua orang bersaudara pada waktu bersamaan, larangan sementara ini berubah segera setelah istrinya meninggal dunia. Setelah itu lelaki dapat menikahi saudara perempuan istrinya yang telah meninggal dunia.
- b. Menikahi wanita yang masih bersuami

⁶¹*Ibid.*,

Seorang laki-laki tidak boleh menikahi perempuan yang sudah bersuami. Namun, larangan ini tidak berlaku lagi, baik karena suaminya meninggal dunia atau karena cerai, setelah habis masa iddahnya.

c. Menikahi wanita yang masih dalam masa iddah

Seorang laki-laki tidak boleh menikahi wanita yang masih dalam masa iddahnya. Larangan ini akan hilang setelah habis iddahnya.

d. Wanita-wanita musyrik

Seorang laki-laki tidak boleh menikahi dengan wanita musyrik, namun apabila wanita itu sudah muslim maka halal lah untuk dinikahi.

e. Orang-orang yang sedang ihram

Orang-orang yang sedang ihram, baik itu ihram haji maupun ihram ibadah umroh, sebagaimana sabda nabi SAW yang artinya : “Dari Ustman bin Affan, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang sedang ihram tidak boleh kawin, tidak boleh dikawinkan dan tidak pula meminang. Jika telah selesai ihram maka bolehlah untuk menikah.”⁶²

Selain dari penjelasan di atas, agama Islam juga secara tegas melarang beberapa pernikahan diantaranya yaitu :

a. Nikah Mut’ah (kawin kontrak) Mut’ah juga disebut nikah temporer atau nikah terputus. Maksudnya seorang laki menikahi perempuan untuk sehari, seminggu, sebulan atau yang lain. Disebut mut’ah karena si lelaki mendapatkan manfaat dan kesenangan dengan pernikahan

⁶²*Ibid.*, 231

itu hingga waktu yang ditentukan. Nikah mut'ah disepakati haram oleh seluruh madzhab. Mereka menyatakan, jika dilaksanakan nikah mut'ah hukumnya batil.⁶³ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ أَذِنْتُمْ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (رواه مسلم)

Artinya : “Rasulullah SAW bersabda wahai para manusia, sesungguhnya aku telah mengizinkan kamu untuk melakukan nikah mut'ah dengan wanita, dan sesungguhnya Allah telah mehangramkan yang demikian itu sampai hari kiamat”.(H.R. muslim)⁶⁴

- b. Nikah Muhallil, yaitu nikah dengan perjanjian ketika isteri sudah disetubuhi maka istri akan ditalak kembali. Akad tersebut hanyalah sebagai syarat agar suami pertama bisa kembali menikahi lagi bekas istrinya yang ditalak bain (talak tiga). Atau suatu pernikahan bertujuan untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga kali oleh suaminya, agar suami yang pertama dapat kembali kepada istrinya.⁶⁵

Rasulullah SAW bersabda :

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه احمد و النسائي و ترمذي)

Artinya : “Dari Ibnu Mas’ud ia menuturkan, Rasulullah SAW telah melaknat muhallil (penghalal) dan muhallal lahu (yang

⁶³Sulaiman al-Faifi, *op.cit.*, h. 425.

⁶⁴Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), Cet. ke- 1 Jilid 25, h, 222.

⁶⁵Sulaiman al-Faifi, *op.cit.*, h. 427.

dibatalkan untuknya).” (RH. Ahmad, An-Nasa’i dan At-Tarmi).⁶⁶

- c. Nikah Sigbar (barter) atau silang. para ulama sepakat bentuknya ialah, seorang menikahkan wanita yang berada dibawah perwaliannya dengan orang lain, dengan syarat orang lain tersebut menikahnya dengan wanita yang berada dibawah perwaliannya juga, tanpa ada mahar diantara keduanya.⁶⁷ Rasulullah SAW bersabda :

صلى الله عليه وسلم: نهى عن الشغار و
الشغار ان يزوج الرجل ابنته وليس بينهما صداق (رواه الجرم)

Artinya : “Dari Nafi, dari Ibnu Umar: bahwasanya Rasulullah SAW melarang nikah syighar adalah laki-laki menikahkan putrinya dengan seorang syarat orang itu harus menikahkan dirinya dengan putrinya, tanpa mahar diantara keduanya. (H.R. Jamaah)”.⁶⁸

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Mustaka Azzam, 2007), Cet. ke-2, Jilid 2, h. 115.

⁶⁸Ibnu Hajar al-Asqalani, *op.cit.*, h. 206.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Nikah Lusan Besan Di Kecamatan Sabak Auh

Persepsi (*perception*) dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luasnya ialah pandangan yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.⁶⁹ Dalam Jalaluddin Rahmat disebutkan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.⁷⁰ Sedangkan pengertian persepsi menurut Bimo Walgito yaitu merupakan pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktifitas integrated dalam diri individu.⁷¹

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah kecakapan untuk melihat, memahami kemudian menafsirkan suatu stimulus sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan menghasilkan penafsiran. Proses persepsi individu akan mengadakan penyeleksian apakah stimulus itu berguna atau tidak baginya, serta menentukan apa yang terbaik untuk

⁶⁹Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), Cet. ke- 5, h. 445

⁷⁰Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), Cet. ke- 2 h. 51

⁷¹Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002),Cet. ke-1, h. 53-54

dilakukan. Berdasarkan pengertian di atas maka persepsi berkaitan dengan tingkah laku. Oleh sebab itu individu yang persepsinya positif tentang sesuatu obyek, ia cenderung akan bertindak laku positif terhadap obyek itu, sebaliknya individu yang persepsinya negatif tentang sesuatu obyek, ia akan cenderung bertindak laku negatif terhadap obyek tersebut.

Dalam penelitian ini persepsi yang dimaksud adalah persepsi masyarakat etnis Jawa tentang larangan nikah karena lusan besan. Berikut ini disajikan data tentang hasil angket yang disebarkan kepada 357 responden.

TABEL IV. 1.
JAWABAN RESPONDEN TENTANG PENDAPAT ADANYA
TRADISI LARANGAN NIKAH LUSAN BESAN DI KECAMATAN
SABAK AUH

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat setuju	8	2.24
2	Setuju	164	45.94
3	Kurang setuju	109	30.53
4	Tidak setuju	69	19.33
5	Sangat tidak setuju	7	1.96
JUMLAH		357	100.00

Sumber: Data Primer, 2012

Dari hasil tabel di atas diperoleh bahwa banyaknya responden yang menyatakan setuju tentang adanya tradisi larangan lusan besan di kecamatan Sabak Auh sebagian besar masih setuju dengan adanya tradisi larangan nikah karena lusan besan. Kesimpulan ini diambil berdasarkan sebanyak 357 orang sampel 2.24 % menyatakan sangat setuju, 45.94% menyatakan setuju, 30.53% menyatakan Kurang lebih setuju, 19.33% tidak setuju dan 1.96% menyatakan sangat tidak setuju.

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa pada umumnya masyarakat etnis Jawa di Kecamatan Sabak Auh dalam kehidupan sehari-hari masih terpengaruh dengan tradisi yang dibawanya dari tanah asalnya, dalam melaksanakan pernikahan selalu memasukkan tradisi yang ada di masyarakatnya seolah-olah tradisi yang ada itu menjadi suatu yang wajib dilaksanakan untuk lebih jelas dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

TABEL IV. 2
JAWABAN RESPONDEN TENTANG PENDAPAT
DILAKSANAKAN PERNIKAHAN PADA ORANG LAIN

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat setuju	2.00	0.56
2	Setuju	30.00	8.40
3	Ragu-ragu	219.00	61.34
4	Tidak setuju	91.00	25.49
5	Sangat tidak setuju	15.00	4.20
JUMLAH		357.00	100.00

Sumber: Data Primer, 2012

Dari hasil tabel di atas diperoleh bahwa banyaknya responden yang memberi pendapat tentang jika di kalangan masyarakat dilangsungkan pernikahan namun mereka termasuk kedalam lusar besan sebagian besar berpendapat netral jika dilangsungkan pernikahan, hasil ini diambil berdasarkan sebanyak 357 orang sampel 0.56% menyatakan setuju, 8.40% menyatakan setuju, 61.34% menyatakan ragu-ragu, 25.49% menyatakan tidak setuju, dan 4.20% menyatakan sangat tidak setuju.

Sebuah tradisi akan menjadi sesuatu yang penting jika tradisi terus menerus di jalankan dalam kegiatan pernikahan dan bahkan bisa mengalahkan yang pokoknya. hal yang masih di yakini oleh masyarakat etnis Jawa di kecamatan Sabak Auh agar tidak terjadi penyesalan dikemudian hari, hal ini

dapat kita lihat pada tabel berikut keyakinan masyarakat terhadap tradisi nikah lusan besan.

TABEL IV. 3.
JAWABAN RESPONDEN TENTANG PENDAPAT KEYAKINAN
TERHADAP TRADISI LARANGAN NIKAH LUSAN BESAN

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat yakin	13	3.64
2	Yakin	99	27.73
3	Ragu-ragu	152	42.58
4	Tidak yakin	87	24.37
5	Sangat tidak yakin	6	1.68
JUMLAH		357	100.00

Sumber: Data Primer, 2012

Dari hasil tabel di atas diperoleh bahwa banyaknya responden yang memberi pendapat tentang kepercayaan terhadap tradisi larangan nikah karena lusan besan hanya sebagian kecil berpendapat sangat tidak setuju dan sangat yakin, hasil ini diambil berdasarkan sebanyak 357 orang sampel 3.64% menyatakan sangat setuju, 27.73% menyatakan yakin, 42.58% menyatakan ragu-ragu, 24.37% tidak yakin dan 1.68% sangat tidak yakin.

Masyarakat jawa di kecamatan Sabak Auh masih sangat terikat dengan tradisi adat istiadat dari tanah leluhurnya dan sebagian kecil saja yang tidak peduli dengan tradisi dan adat istiadat jawa yang berkembang, tradisi dan adat istiadat tidak hilang ditelan masa, maka dengan ini masyarakat masih tetap mempertahankan tradisi yang ada untuk lebih jelas kita lihat pada tabel di bawah ini

TABEL IV. 4.
JAWABAN RESPONDEN TENTANG PENDAPAT KELAYAKAN
TRADISI LUSAN BESAN UNTUK DIPERTAHANKAN

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat setuju	7	1.96
2	Setuju	79	22.13
3	Ragu-Ragu	187	52.38
4	Tidak setuju	71	19.89
5	Sangat tidak setuju	13	3.64
JUMLAH		357	100.00

Sumber: Data Primer, 2012

Dari hasil tabel di atas diperoleh bahwa banyaknya responden yang memberi pendapat tentang kelayakan tradisi lusan besan untuk dipertahankan sebagian besar berpendapat ragu-ragu, hasil ini diambil berdasarkan sebanyak 357 orang sampel 1.96% menyatakan sangat setuju, 22.13% menyatakan setuju, 52.38% menyatakan ragu-ragu, 19.89% tidak setuju dan 3.64% sangat tidak setuju.

Seatu tradisi atau adat istiadat yang berkembang pada masyarakat jawa muslim perlu terus dikembangkan selama adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan Akidah Syariat Islam. Hal ini untuk memastikan pendapat masyarakat kesesuaian tradisi larangan nikah lusan besan pada saat ini, hal ini tanggapan responden berdasarkan tabel dibawah ini

TABEL IV. 5.
JAWABAN RESPONDEN TENTANG PENDAPAT KESESUAIAN
TRADISI PADA SAAT INI

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat setuju	0	0.00
2	Setuju	39	10.92
3	Netral	259	72.55
4	Tidak setuju	57	15.97
5	Sangat tidak setuju	2	0.56
JUMLAH		357	100.00

Sumber: Data Primer, 2012

Dari hasil tabel di atas diperoleh bahwa banyaknya responden yang memberi pendapat tentang apakah tradisi larangan nikah karena lusan besan relevan (cocok) atau sesuai dengan hukum Islam saat ini sebagian besar berpendapat ragu-ragu, hasil ini diambil berdasarkan sebanyak 357 orang, 10.92% menyatakan setuju, 72.55% menyatakan ragu-ragu, 15.97% tidak setuju dan 0.56% sangat tidak setuju.

Sedangkan pendapat masyarakat yang melarang keluarganya dalam masalah larangan pernikahan lusan besan dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

TABEL IV. 6.
JAWABAN RESPONDEN TENTANG PENDAPAT LARANGAN
NIKAH LUSAN BESAN DI DALAM KELUARGA

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat setuju	0	0.00
2	Setuju	71	19.89
3	Netral	183	51.26
4	Tidak setuju	102	28.57
5	Sangat tidak setuju	1	0.28
JUMLAH		357	100.00

Sumber: Data Primer, 2012

Dari hasil tabel di atas diperoleh bahwa banyaknya responden yang memberi pendapat tentang apakah anda setuju untuk tidak menentang tradisi tentang larangan nikah, jika ada dari keluarga anda mengalami lusan besan sebagian besar berpendapat netral, hasil ini diambil berdasarkan sebanyak 357 orang 19.89% menyatakan setuju, 51.26% menyatakan netral, 28.57% tidak setuju dan 0.28% menyatakan sangat tidak setuju.

Pelanggaran terhadap hukum adat kadang kala harus memutuskan hubungan persaudaraan sesama keluarga dan masalah-masalah lain. Padahal

hukum Islam sendiri tidak pernah memandang bahwa adat itu harus dipertahankan sebagai mana mestinya. Meskipun pelanggaran adat ini tidak akan mendapat ancaman dan hukuman seperti hukum Islam, namun dalam kehidupan yang masih kuat dengan adat istiadat pelanggaran tersebut merupakan suatu hal yang sangat vatal dimata masyarakat. Hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut:

TABEL IV. 7.
JAWABAN RESPONDEN TENTANG PENDAPAT PERISTIWA
PELANGGARAN TRADISI NIKAH LUSAN BESAN

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat setuju	2	0.56
2	Setuju	44	12.32
3	Kurang tahu	252	70.59
4	Tidak setuju	52	14.57
5	Sangat tidak setuju	7	1.96
JUMLAH		357	100.00

Sumber: Data Primer, 2012

Dari hasil tabel di atas diperoleh bahwa banyaknya responden yang memberi pendapat tentang salah satu peristiwa kemalangan yang terjadi pada salah satu anggota yang merupakan lusan besan merupakan akibat dari pelanggaran tentang tradisi larangan nikah lusan besan sebagian besar berpendapat kurang tahu, hasil ini diambil berdasarkan sebanyak 357 orang 0.56% menyatakan sangat setuju, 12.32% menyatakan setuju, 70.59% menyatakan kurang tahu, 14.57% tidak setuju, dan 1.96% sangat tidak setuju.

Adat memang hidup dan berkembang oleh manusia yang melaksanakan adat tersebut. Adat dan tradisi juga merupakan refpeksi dan cara pandang dan filosofis masyarakat yang bersangkutan, sehingga antara adat satu dengan yang lain tidak bisa saling di bandingkan apalagi saling

merendahkan, semuanya saling memiliki kekuatan sebagai jalan hidup. Dapat kita lihat tabel di bawah ini respon masyarakat tentang pendapat diberlakukan tradisi larangan nikah lusan besan ini.

TABEL IV. 8.
JAWABAN RESPONDEN TENTANG PENDAPAT
DIBERLAKUKANNYA TRADISI LARANGAN NIKAH LUSAN
BESAN PADA ETNIS JAWA

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat setuju	3	0.84
2	Setuju	56	15.69
3	Ragu-ragu	215	60.22
4	Tidak setuju	73	20.45
5	Sangat tidak setuju	10	2.80
JUMLAH		357	100.00

Sumber: Data Primer, 2012

Dari hasil tabel di atas diperoleh bahwa banyaknya responden yang memberi pendapat tentang diberlakukannya tradisi lusan besan pada etnis Jawa sebagian besar berpendapat ragu-ragu, hasil ini diambil berdasarkan sebanyak 357 orang 0.84% menyatakan sangat setuju, 15.69% menyatakan setuju, 60.22% menyatakan ragu-ragu, 20.45% tidak setuju, dan 2.80% sangat tidak setuju.

Berdasarkan dari jawaban responden di atas tersebut, maka dapat di ketahui bahwa masyarakat Sabak Auh sebagian besar masih setuju tradisi itu diberlakukan. perkawinan dimasyarakat Jawa diatur oleh kedua oleh dua pihak, pada umumnya setiap pemuda dan pemudi akan memutuskan menikah setelah mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua mereka, oleh karena itu apabila ada larangan hukum maka mereka enggan untuk melangsungkan akad

nikah. Untuk lebih jelas jawaban responden pada pernikahan pada diri sendiri dapat kita lihat tabel di bawah ini.

TABEL IV. 9.
JAWABAN RESPONDEN TENTANG PENDAPAT PELAKSANAAN
PERNIKAHAN PADA DIRI SENDIRI

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat setuju	14	3.92
2	Setuju	217	60.78
3	Ragu-ragu	98	27.45
4	Tidak setuju	27	7.56
5	Sangat tidak setuju	1	0.28
JUMLAH		357	100.00

Sumber: Data Primer, 2012

Dari hasil tabel di atas diperoleh bahwa banyaknya responden yang memberi pendapat tentang apakah anda setuju untuk tidak melangsungkan pernikahan, jika anda termasuk kedalam lusau besan sebagian besar berpendapat setuju, hasil ini diambil berdasarkan sebanyak 357 orang 3.92% menyatakan sangat setuju, 60.78% menyatakan setuju, 27.45% menyatakan ragu-ragu, 7.56% menyatakan tidak setuju, dan 0.28% sangat tidak setuju.

Dari tabel di atas kita lihat masyarakat setempat masih enggan untuk melangsungkan pernikahan apabila adat melarang, dalam artian masih percaya larangan terhadap adat tersebut. Untuk mengetahui sejauhmana pemahaman masyarakat terhadap hukum agama Islam, dapat kita pahami di bawah ini.

TABEL IV. 10.
JAWABAN RESPONDEN TENTANG PENDAPAT BERTENTANGAN
ATAU TIDAK LARANGAN MENIKAH LUSAN BESAN DENGAN
AGAMA ISLAM

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat setuju	17	4.76
2	Setuju	89	24.93
3	Kurang tahu	228	63.87
4	Tidak setuju	22	6.16
5	Sangat tidak setuju	1	0.28
JUMLAH		357	100.00

Sumber: Data Primer, 2012

Dari hasil tabel di atas diperoleh bahwa banyaknya responden yang memberi pendapat tentang apakah tradisi tentang larangan menikah karena lusnan besan bertentangan dengan agama Islam sebagian besar berpendapat kurang tahu, hasil ini diambil berdasarkan sebanyak 357 orang, 4.76% menyatakan sangat setuju, 24.93% menyatakan setuju, 63.87% menyatakan kurang tahu, 6.16% tidak setuju, dan 0.28% sangat tidak setuju.

Kalau berdasarkan tabel di atas masyarakat masih lemahnya pemahaman dalam hukum yang sesungguhnya, yaitu hukum Islam. Islam adalah agama yang universal, karena didalamnya terdapat aturan-aturan dari segala aspek-aspek kehidupan. Aturan-aturan yang terkandung dalam hukum Islam yang berbeda dengan aturan-aturan yang terdapat dalam norma agama. Dalam menghadapi prinsip-prinsip yang berbeda tersebut, maka kita sebagai umat Islam harus menjalani prinsip yang berdasarkan pada aturan Islam yang hukumnya bersifat fleksibel yang artinya sesuai dengan segala tempat, kondisi dan zaman.

TABEL IV. 11.
REKAPITULASI DATA TENTANG PERSEPSI MASYARAKAT
TERHADAP TRADISI LARANGAN NIKAH LUSAN BESAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

No Item	Option										Jumlah	
	A		B		C		D		E			
	F	P(%)	F	P(%)	F	P(%)	F	P(%)	F	P(%)	F	P(%)
1	8	2.24	164	45.94	109	30.53	69	19.33	7	1.96	357	100
2	2	0.56	30	8.40	219	61.34	91	25.49	15	4.20	357	100
3	13	3.64	99	27.73	152	42.58	87	24.37	6	1.68	357	100
4	7	1.96	79	22.13	187	52.38	71	19.89	13	3.64	357	100
5	0	0.00	39	10.92	259	72.55	57	15.97	2	0.56	357	100
6	0	0.00	71	19.89	183	51.26	102	28.57	1	0.28	357	100
7	2	0.56	44	12.32	252	70.59	52	14.57	7	1.96	357	100
8	3	0.84	56	15.69	215	60.22	73	20.45	10	2.80	357	100
9	14	3.92	217	60.78	98	27.45	27	7.56	1	0.28	357	100
10	17	4.76	89	24.93	228	63.87	22	6.16	1	0.28	357	100

Berdasarkan item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh bahwa dalam mengumpulkan data terhadap persepsi masyarakat etnis Jawa tentang larangan untuk menikah karena lusan besan digunakan angket yang terdiri dari pertanyaan positif dan negatif. Maka untuk mengetahui persepsi masyarakat tersebut secara keseluruhan sebagai berikut:

1. Nilai Kumulatif Perhitungan Angket Untuk Pertanyaan Positif

TABEL IV.12
NILAI KUMULATIF PERHITUNGAN ANGKET UNTUK
PERTANYAAN POSITIF

No Item	Option										Jumlah	
	A		B		C		D		E			
	F	P(%)	F	P(%)	F	P(%)	F	P(%)	F	P(%)	F	P(%)
1	8	2.24	164	45.94	109	30.53	69	19.33	7	1.96	357	100
3	13	3.64	99	27.73	152	42.58	87	24.37	6	1.68	357	100
4	7	1.96	79	22.13	187	52.38	71	19.89	13	3.64	357	100
6	0	0	71	19.89	183	51.26	102	28.57	1	0.28	357	100
7	2	0.56	44	12.32	252	70.59	52	14.57	7	1.96	357	100
	30	8.4	457	128.01	883	247.34	381	106.73	34	9.52	1785	500

Alternatif Jawaban A sebanyak	30 x 5	= 150
Alternatif Jawaban B sebanyak	457 x 4	= 1828
Alternatif Jawaban C sebanyak	883 x 3	= 2649
Alternatif Jawaban D sebanyak	381 x 2	= 762
Alternatif Jawaban E sebanyak	34 x 1	= 34
	<hr/>	
	1785	= 5423

Nilai kumulatif persepsi masyarakat etnis Jawa terhadap larangan nikah besan untuk pertanyaan positif adalah 5423, sedangkan nilai yang diharapkan adalah 8925 yang diperoleh dari $(1785 \times 5 = 8925)$.

2. Perhitungan Angket Untuk Pertanyaan Negatif

TABEL IV.13
NILAI KUMULATIF PERHITUNGAN ANGKET UNTUK
PERTANYAAN NEGATIF

No Item	Option										Jumlah	
	A		B		C		D		E			
	F	P(%)	F	P(%)	F	P(%)	F	P(%)	F	P(%)	F	P(%)
2	2	0.56	30	8.4	219	61.34	91	25.49	15	4.2	357	100
5	0	0	39	10.92	259	72.55	57	15.97	2	0.56	357	100
8	3	0.84	56	15.69	215	60.22	73	20.45	10	2.8	357	100
9	14	3.92	217	60.78	98	27.45	27	7.56	1	0.28	357	100
10	17	4.76	89	24.93	228	63.87	22	6.16	1	0.28	357	100
	36	10.08	431	120.72	1019	285.43	270	75.63	29	8.12	1785	500

Alternatif Jawaban A sebanyak	36 x 1	= 36
Alternatif Jawaban B sebanyak	431 x 2	= 862
Alternatif Jawaban C sebanyak	1019 x 3	= 3057
Alternatif Jawaban D sebanyak	270 x 4	= 1080
Alternatif Jawaban E sebanyak	29 x 5	= 145
	<hr/>	
	1785	= 5180

Nilai kumulatif persepsi masyarakat etnis Jawa terhadap larangan nikah besan untuk pertanyaan positif adalah 5180, sedangkan nilai yang diharapkan adalah 8925 yang diperoleh dari $(1785 \times 5 = 8925)$.

Jadi nilai kumulatif persepsi masyarakat etnis Jawa tentang larangan nikah karena lusan besan adalah 10603 yang diperoleh dari $(5423 + 5180 = 10603)$, sedangkan nilai yang diharapkan adalah 17850 yang diperoleh dari $(8925 + 8925 = 17850)$

Penentuan penelitian dicari dengan memasukkan ke dalam rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

$$P = \frac{10603}{17850} \times 100\%$$

$$P = 59.40\%$$

Angka yang sudah dipresentasikan tersebut, selanjutnya ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kuantitatif sebagai berikut.

- a. Jika antara 81- 100% maka dikategorikan sangat positif
- b. Jika antara 61- 80% maka dikategorikan positif
- c. Jika antara 41- 60% maka dikategorikan cukup positif
- d. Jika antara 21- 40% maka dikategorikan tidak positif
- e. Jika antara 0 - 20% maka dikategorikan sangat tidak positif

Jadi, dengan melihat persentase secara keseluruhan dari 10 item pertanyaan yang disebarkan dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat Jawa tentang larangan nikah karena lusan besan terletak pada kategori cukup positif dengan persentase sebesar 59.40%. Hasil ini menunjukkan

bahwa masyarakat etnis Jawa masih cukup meyakini bahwa tradisi larangan untuk menikah karena lusan besan.

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tradisi Larangan Nikah Karena Lusan Besan.

Untuk mengumpulkan data tentang faktor-faktor yang menyebabkan adanya larangan nikah karena lusan besan peneliti melakukan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa tokoh adat, tokoh agama dan pemuka masarakat. Larangan Nikah lusan besan merupakan adat yang turun temurun yang telah ada pada etnis masyarakat Jawa khususnya yang ada di kecamatan Sabak Auh . Pada dasarnya nikah merupakan suatu langkah yang terbaik yang ditempuh oleh seseorang untuk mendapatkan pasangan hidup, tetapi mengapa dalam hal adat banyak sekali pantangan-pantangan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.

Menurut Bapak Semo larangan nikah karena lusan besan termasuk larangan bagi masyarakat etnis Jawa dalam melangsungkan pernikahan karena:

1. Merupakan suatu hal yang tabu di mata masyarakat.
2. Akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga tersebut.⁷²

Dikarenakan hal tersebut di atas maka nikah karena lusan besan tersebut menjadi terlarang, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya. Dampak negatif tersebut bisa saja terjadi pada

⁷²Semo, Pemuka Adat, *Wawancara*, desa Belading, 02 Juli 2012

pihak suami dan bisa juga terjadi pada istri, kadangkala ada pihak laki-laki yang meninggal ada pula pihak istri yang meninggal.

Sedangkan menurut Bapak Tumiran, pernikahan yang dilakukan karena lusan besan dilarang menurut adat disebabkan beberapa faktor yaitu:

1. Kehidupan rumah tangga tidak akan mendapatkan kebahagiaan bagi pelaku yang melaksanakan nikah karena lusan besan.
2. Renggangnya hubungan dua orang anak dengan orang tua sekaligus.
3. Adanya sumbang pandang masyarakat melihat dua pasangan pengantin pada saat bersanding.⁷³

Berdasarkan beberapa faktor di atas maka menurut bapak jemiran sebagai salah satu pemuka adat yang berdomsili di Desa Belading mengatakan nikah karena lusan besan itu dilarang, meskipun faktornya tidak begitu terperinci secara detail namun dikarenakan bagi pihak yang melakukan pernikahan karena lusan besan akan mengalami hal-hal di atas, maka dari situlah masyarakat mengambil I'tibar (pelajaran), sehingga pernikahan semacam ini tidak boleh dilakukan.⁷⁴

Menurut Bapak Jauhari ia mengatakan demikian juga. Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan hal semacam itu dilarang dalam hukum adat secara tertulis tidak ada dijelaskan. Mengenai hal demikian dan ketepatan secara rinci juga tidak, hal ini hanya sejarah dan perilaku yang dialami bagi orang yang melakukan nikah karena lusan besan. Karena mereka mengalami hal-hal

⁷³Tumiran Toko Adat, *Wawancara*, desa Laksamana, 06 Juli 2012

⁷⁴Jemiran Pemuka Masyarakat, *Wawancara*, desa Belading, 2 Juli 2012

yang buruk dan tidak baik maka masyarakat menganggap hal itu karena kesalahan adat. Meskipun sebenarnya itu merupakan takdir, tapi dalam adat takdir seringkali dijadikan objek dalam pelanggaran adat.⁷⁵

Dalam menjelaskan hukum adat dengan hukum Islam, sebenarnya sungguh sangat jauh berbeda. Hukum adat merupakan hukum atau peraturan yang dibuat oleh masyarakat atau sekelompok orang banyak yang berfungsi untuk menata kehidupan bermasyarakat. Sedangkan hukum Islam adalah hukum atau syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk memperoleh kebahagiaan dunai dan akhirat. Namun kadangkala hukum yang kuat dipercaya bagi orang yang hidup dalam lingkungan adat yang ketat.

Menurut Bapak Peno pelanggaran adat merupakan hukum hal yang sangat buruk, sebab bagi yang melanggar adat bisa saja ia dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat. Beda dengan pelanggaran hukum Islam, kita bisa bertaubat dan minta ampun secara individu kepada Allah SWT, tapi pelanggaran atas adat kita akan dicap orang yang “tidak beradat istiadat”, sehingga dimata masyarakat kita tidak ada harganya lagi.⁷⁶

Sedangkan menurut bapak Senin, faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan karena lusan besan itu dilarang karena dampak dari pernikahan itu sendiri dalam menjalani kehidupannya nanti mau tak mau harus menerima kejadian yang menimpa mereka, yang mana salah satu mereka ada yang harus berpisah, baik berpisah hidup (cerai) maupun berpisah mati (meninggal) dan

⁷⁵Jauhari Pemuka Masyarakat, *wawancara*, desa Sungai Tengah, 07 Juli 2012

⁷⁶Peno, Pemuka Adat, *wawancara*, desa Belading, 07 Juli 2012

hal ini kadangkala menimpa kepada pihak suami dan kadangkala menimpa pada pihak istri.⁷⁷ Itulah kenyataan yang terjadi, hal itu dijadikan kambing hitam dalam melaksanakan nikah karena lusan besan.

Berdasarkan beberapa keterangan yang dikemukakan oleh beberapa pemuka adat di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai dilarangnya melakukan nikah karena lusan besan. Meskipun secara tertulis tidak ada ketetapan tentang larangan tersebut, namun melihat dari apa yang terjadi dan dialami oleh orang-orang yang melakukan pernikahan karena lusan besan. Maka dapat disimpulkan bahwa mengenai faktor-faktor adanya larangan menikah karena lusan besan diantaranya yaitu:

1. Dapat menimbulkan mala petaka
2. Tidak terciptanya keharmonisan dan kebahagiaan kehidupan dalam rumah tangga.
3. Adanya pandangan masyarakat yang menyakini jika melanggar tradisi tersebut akan mendapat petaka.
4. Ketakutan masyarakat akan terputusnya tali silaturahmi.
5. Adanya beberapa peristiwa yang dianggap telah melanggar tradisi yang mengakibatkan pandangan masyarakat bahwa hal tersebut merupakan akibat telah melanggar tradisi larangan nikah karena lusan besan.

⁷⁷Senin, Pemuka Agama, *Wawancara*, desa Belading 2 Juli 2012

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi Larangan Nikah Lusan Besan pada Masyarakat Etnis Jawa di Kecamatan Sabak Auh

Didalam kehidupan masyarakat Kecamatan Sabak Auh, adat merupakan norma-norma dan peraturan yang harus diikuti oleh masyarakat setempat meskipun pada intinya adat itu tidak tertulis. Adat yang telah berkembang di Kecamatan Sabak Auh tersebut mengandung prinsip-prinsip yang berdasarkan pemikiran-pemikiran manusia yang telah berlangsung turun-temurun dari generasi ke generasi, suatu generasi yang mengikuti aturan adat tersebut menganggap itulah yang baik dalam mengatur kehidupan masyarakat dan itulah yang dilakukan oleh nenek moyang mereka sebelumnya.

Islam adalah agama yang universal, karena didalamnya terdapat aturan-aturan dari segala aspek-aspek kehidupan. Aturan-aturan yang terkandung dalam hukum Islam yang berbeda dengan aturan-aturan yang terdapat dalam norma agama. Dalam menghadapi prinsip-prinsip yang berbeda tersebut, maka kita sebagai umat Islam harus menjalani prinsip yang berdasarkan pada aturan Islam yang hukumnya bersifat fleksibel yang artinya sesuai dengan segala tempat, kondisi dan zaman.

Adapun yang dijadikan dasar dalam penyelesaian jika terjadi suatu persoalan adalah unsur maslahat umum. Maslahat umum dapat ditinjau dari dua segi, yaitu :

1. Mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat
2. Menghindarkan kemudharatan bagi kehidupan masyarakat.

Aturan yang terdapat didalam adat dianggap baik oleh agama adalah apabila didalamnya terdapat unsur maslahat dan tidak ada pada unsur mudharat, demikian juga halnya sesuatu dianggap tidak baik bila didalamnya mengandung unsur yang tidak baik atau mudharat.

Unsur manfaat dan mudharat inilah yang dijadikan dasar pertimbangan dalam menyelesaikan suatu adat, artinya suatu yang biasa oleh masyarakat dan telah meyerap dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat karena suatu yang dianggap baik oleh umat secara menyeluruh adalah baik juga menurut pandangan Allah SWT, adat seperti inilah yang dapat dijadikan sumber hukum.

Istilah tradisi dalam Islam dikenal dengan nama '*urf*'. Secara etimologi '*urf*' berarti yang baik.⁷⁸ Sedangkan secara terminologi '*urf*' ialah sesuatu perbuatan yang terus menerus dilakukan manusia, karena logis dilakukan dan dilakukan terus menerus. Begitu pula pengertian '*urf*' yang penulis kutip dari buku karangan Prof. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan yang ditinggalkan.⁷⁹

Mengenai adat yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat antara lain yaitu :

1. Tidak bertentangan dengan nash baik al-Qur'an maupun as-Sunnah.

⁷⁸ Nasron Haroen, *usul fiqh I*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet Ke-2, h. 137.

⁷⁹ Muklis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushulyyah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1999), Cet.Ke-3, h. 141

2. Tidak menyebabkan kemaslahatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk memberi kesempatan dan kesulitan.
3. Telah berlaku pada umumnya kepada kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang Islam saja.
4. Tidak berlaku didalam masalah Ibadah Mahdlah.⁸⁰

Menurut Imam Malik '*Urf*' terbagi dua :

1. '*Urf*' yang diakui dan ditetttapkan tidak akan berubah dengan perubahan masa dan tempat. Yaitu '*urf*' yang merupakan fitrah manusia dan tabiat manusia, seperti makan, minum, tidur dan lain sebagainya.
2. '*Urf*' yang dapat diubah dengan perubahan masa dan tempat.

Pandangan Imam Malik di atas,menunjukkan '*urf*' bukanlah sesuatu hal yang terdoqma dan tidak dapat berubah seiring dengan perubahan waktu, tempat dan kebudayaan. Dari segi keabsahannya dalam pandangan syara', '*urf*' terbagi kepada dua macam, yaitu:

- a. *Al-urf al-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), yang tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.
- b. *Al-urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil syara' dan kaedah dasar-dasar yang ada dalam syara'.

Para ulama usul fiqh sepakat bahwa '*urf al-shahih*', adalah '*urf*' yang tidak bertentangan dengan syara' dan dapat dijadikan hujjah dalam

⁸⁰ Abdul Wahhab, Khallaf, *ilmu ushul fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), Cet, Ke-1, h.

Kehujjahan '*urf al-shahih* ini, ditetapkan oleh ulama usul fiqh dalam

Berpijak dari pandangan di atas, kemudian dihubungkan dengan kondisi

Allah menjadikan agama bukanlah untuk membuat manusia menjadi sulit, sebagaimana firmanNya dalam surah al-haj ayat 78 :



⁸¹ M. Hasbi Al Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet. Ke-2, h.73-74

Artinya : 78. ... “ Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan....⁸²

Segala hukum yang diwahyukan Allah tidak ada didalamnya sesuatu yang menimbulkan kepicikan serta sukar dipikul atau dijalankan manusia dalam *Da'a'imu Tasyrik'* (tiang-tiang pokok pembinaan hukum Islam, ada yang disebut *Nafyu al-Haraj* mengadakan kepicikan). Sesuai dengan kaedah yang berbunyi :

الميسور لا يسقط بالمعسور

Artinya : “ Sesuatu perbuatan yang mudah dijalankan tidak dapat digugurkan dengan perbuatan yang sukar dijalankan”.⁸³

⁸² Depag RI, *loc. cit.*, h. 121

⁸³ Muklis Usman, *op.cit.*, h.174

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari data yang penulis kumpulkan berdasarkan pada analisa data yang diperoleh melalui hasil angket dan wawancara, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat etnis jawa tentang larangan masyarakat jawa tentang larangan nikah karena lusan besan menunjukkan bahwa masyarakat etnis jawa masih cukup meyakini bahwa tradisi larangan untuk menikah karena lusan besan. Hasil ini berdasarkan 10 pertanyaan angket yang disebarkan kepada 357 responden diperoleh persentase total berada pada kategori cukup positif dengan persentase 59.40%.
2. Faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat tentang larangan nikah karena lusan besan adalah:
 - a. Adanya pandangan masyarakat yang dapat menimbulkan mala petaka.
 - b. Tidak terciptanya keharmonisan dan kebahagiaan kehidupan dalam rumah tangga.
 - c. Adanya pandangan masyarakat yang menyakini jika melanggar tradisi tersebut akan mendapat petaka.
 - d. Ketakutan masyarakat akan terputusnya tali silaturahmi.
 - e. Adanya beberapa peristiwa yang dianggap telah melanggar tradisi yang mengakibatkan pandangan masyarakat bahwa hal tersebut

merupakan akibat telah melanggar tradisi larangan nikah karena lusan besan.

3. Dari segi tinjauan hukum Islam larangan nikah karena lusan merupakan larangan yang bertentangan dengan hukum Islam, oleh sebab itu adat tersebut tidak dapat diterapkan, karena adat yang dapat hujjah adalah adat Ash-shoheh sedangkan adat al-Fasad tidak dapat dijadikan Hujjah dalam menetapkan hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diajukan beberapa saran yaitu:

1. Tradisi merupakan kepercayaan masyarakat yang diyakini secara turun temurun, oleh karena itu dalam hal mengambil keputusan hukum berdasar tradisi tersebut diperlukan pertimbangan dari segi perspektif hukum Islam.
2. Kepada orang tua kami masyarakat suku jawa terutama tokoh-tokohnya yang di tuakan untuk kiranya selalu memberikan bimbingan pengetahuan tentang adat suku jawa sehingga dapat dijaga dan di lestarikan sampai anak cucu nanti.
3. Kepada generasi muda yang akan menjalani pernikahan, diharapkan untuk mempersiapkan segala sesuatu baik yang bersifat material maupun nonmaterial berupa ilmu pengetahuan sehingga tujuan dari pernikahan yang mulia dapat dicapai.

Melalui saran-saran tersebut diharapkan kalangan masyarakat Jawa dalam melaksanakan pernikahan mempersiapkan dan merencanakan dengan sematang-matangnya, sehingga segala sesuatu yang tidak dikehendaki tidak terjadi dan tujuan pernikahan yang mulia dapat dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, *Hukum Adat Menurut Undang-Undang Republik Indonesia*, Jakarta: Cendana Press, 1984, Cet. ke-2.
- _____, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Presindo, 1992.
- Al Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Alih Bahasa Oleh Hamidi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, Cet. ke-3, Jilid 5.
- Alex Sobur, *Psikologi Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, Cet. ke -3.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009, Cet. ke -3.
- Artatati Agus, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Grill Glass, *Enklopedi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, Cet. ke-2.
- H. Abdul Jamil, dkk., *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gema Media, 2000, Cet. ke-1.
- H. S. A al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, Alih Bahasa Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amami, 1989.
- H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, th, Cet. ke-1.
- H.M.A. Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.
- H.Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. ke-4.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Tinta Mas, 1961, Cet. ke-5.
- Husain Al- Bahresy, *Pedoman Fiqh Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1981, Cet. ke-1.
- _____, *Himpunan Hadis Pilihan Shahih Bukhori* Surabaya: Januari, 1980, Cet. ke-1.

Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azam, 2008, Cet. ke-1 Jilid 25.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Mustaka Azzam, 2007, Cet. ke-2, Jilid 2.

Imam Bukhori, *Al-Bukhori*, tt, Dar-Al-Fik, 1981, Cet. ke-4, Jilid V.

Jaman Nur, *Fiqih Munakat*, Semarang: Toha Putra, 1993, Cet. ke-3.

M. Abu Zahra, Al-Ahwal, *Al-Syahshiyah*, Mesir: Dar Al-Fikri 1967, Cet. ke-3.

M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, Cet. ke-7.

Muhammad Jawad Al-Mughiniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terjemahan Mansykur AB dkk., Jakarta: Letera Basristama, 2000, Cet. ke-5.

Muhammd Jasmi Sukma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, Cet. ke-2.

Munawir Sjadzali, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, Cet. ke-2.

Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005, Cet. ke -2.

Salamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, Cet. ke-1.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Penerjemah Oleh Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala, 2011, Cet. ke-2, Jilid 3.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012, Cet. ke -12.

Sulaiman Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Solo: Aqwam Media Profetike 2010, Cet. ke-1.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001, Cet. ke-2.

T. M Hasbi Ash-Shiddiqi, *Al-Islam*, Jakarta: Bulan, 1997, Cet. ke-2, Jilid 2.

_____, *Fiqh Nabawi*, Surabaya: Al-Ikhlas, tt.